

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak ditetapkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, banyak terjadi perubahan kebijakan daerah di Indonesia. Kedua undang-undang ini merupakan landasan utama bagi desentralisasi pemerintahan dengan memberikan kewenangan pada daerah untuk mengelola berbagai urusan pemerintahan kecuali urusan pertahanan, keamanan, kehakiman, internasional dan moneter. Pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan desentralisasi kewenangan dan desentralisasi keuangan mulai dilaksanakan secara penuh sejak tanggal 1 Januari 2001. Konsekuensinya daerah mulai menyelenggarakan urusan yang sangat luas terutama dalam pengelolaan sumber daya alam, sumber daya keuangan dan penyediaan pelayanan publik.

Secara teoritis, desentralisasi ini diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Manfaat yang kedua

adalah memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang lengkap (Mardiasmo, 2002: 6)

Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah yang dimulai pada tahun 2001 dengan berlandaskan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektifitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya.

Kabupaten Karanganyar memiliki beberapa sektor yang paling dominan. Dalam perkembangannya sektor yang paling dominan dalam pembentukan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hingga kini masih didominasi oleh sektor industri pengolahan, pertanian dan perdagangan sehingga Kabupaten Karanganyar dikenal sebagai kota yang beridentitaskan “INTANPARI” (Industri-Pertanian-Pariwisata).

Sesuai dengan Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah Kabupaten Karanganyar mengelola tujuh jenis pajak daerah dan diantaranya adalah pajak hotel dan pajak restoran.

Mengingat bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dominan di Kabupaten Karanganyar, maka semakin ketatlah persaingan antar daerah di sektor perhotelan dan restoran / rumah makan. Untuk itu perlu dilakukan pengembangan dan peningkatan usaha di sektor yang potensial. Sektor perhotelan dan restoran / rumah makan merupakan sektor yang potensial sehingga diharapkan pajak yang dihasilkan dari sektor tersebut dapat meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Karanganyar

Pemerintah daerah berusaha meningkatkan dan mengembangkan pembangunan perhotelan dan restoran / rumah makan dengan maksud memperbesar pendapatan daerah, memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja, mendorong pembangunan daerah, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, memperkaya kebudayaan nasional dengan tetap memelihara nilai-nilai agama dan mempertahankan kepribadian bangsa. Selain itu, pembangunan ini juga diarahkan untuk mendorong pengembangan, pengenalan dan pemasaran produk nasional.

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kota tujuan wisata yang terkenal di Jawa Tengah karena keindahan alamnya yang berada di daerah pegunungan sehingga sektor perhotelan dan restoran / rumah makan sangat mendukung dalam kegiatan pariwisata di Kabupaten Karanganyar. Untuk mendapatkan gambaran mengenai pajak hotel dan pajak restoran dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Karanganyar, dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.1 Perkembangan Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Karanganyar Tahun 2004 s/d 2008

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Total Pajak Daerah	Total PAD
2004	261.472.173	156.684.543	11.572.405.687	29.485.262.726
2005	325.695.699	201.345.473	13.158.093.041	34.302.565.951
2006	377.673.020	227.795.587	14.543.182.743	46.052.120.123
2007	440.428.766	254.303.867	19.053.558.538	56.889.064.224
2008	575.420.710	367.613.892	21.874.872.161	64.470.676.168

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Karanganyar.

Tabel 1.2 Pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Karanganyar Tahun 2004 s/d 2008

Tahun	Pertumbuhan Pajak Hotel (%)	Pertumbuhan Pajak Restoran (%)	Pertumbuhan Pajak Daerah (%)	Pertumbuhan PAD (%)
2004	13,78	13,51	15,63	17,02
2005	24,56	28,50	13,70	16,34
2006	15,96	13,14	10,53	34,25
2007	16,62	11,64	31,01	23,53
2008	30,65	44,56	14,81	13,33

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Karanganyar, data diolah.

Dari data tersebut di atas dapat diperoleh gambaran mengenai perkembangan pajak daerah khususnya pajak hotel dan pajak restoran serta perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Karanganyar selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. Realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran kelihatan mengalami peningkatan setiap tahun dan jika dibandingkan dengan penerimaan pajak secara keseluruhan, kelihatan bahwa penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami peningkatan setiap tahun.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Karanganyar ?
2. Bagaimanakah kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pajak daerah di Kabupaten Karanganyar ?
3. Seberapa besar potensi pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Karanganyar ?
4. Seberapa besar efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Karanganyar ?
5. Seberapa besar elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Karanganyar ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Karanganyar.
2. Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pajak daerah di Kabupaten Karanganyar.
3. Untuk mengetahui potensi pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Karanganyar.
4. Untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Karanganyar.

5. Untuk mengetahui elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Karanganyar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sebagai acuan dalam mengambil keputusan serta menentukan kebijakan dalam hal perpajakan daerah khususnya pajak hotel dan pajak restoran.
2. Bagi kalangan pebisnis khususnya dalam bidang perhotelan dan restoran supaya dapat lebih meningkatkan potensi hotel dan restoran secara maksimal.
3. Bagi akademisi, menjadi referensi dan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.
4. Bagi masyarakat umum, menjadi bahan bacaan untuk menambah ilmu pengetahuan serta turut memperkaya khasanah penelitian yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sumber- Sumber Penerimaan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan.

1. Pendapatan Daerah bersumber dari :
 - a. Pendapatan Asli daerah (PAD)
 - b. Dana Perimbangan
 - c. Lain-lain Pendapatan
2. Pembiayaan bersumber dari :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah
 - b. Penerimaan Pinjaman Daerah
 - c. Dana Cadangan Daerah
 - d. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Munir, 2003: 38).

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi :

1. Hasil Pajak Daerah, diperoleh dari kewajiban penduduk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman. Dalam hal ini, pajak daerah memenuhi beberapa persyaratan, antara lain :
 - 1) Tidak bertentangan atau harus searah dengan kebijakan pemerintah pusat;
 - 2) Harus sederhana dan tidak terlalu banyak jenisnya;
 - 3) Biaya administrasi harus mudah;
 - 4) Tidak mencampuri sistem perpajakan pusat menurut perturan-peraturan yang ditetapkan oleh daerah, serta dapat dipaksakan.
2. Hasil Retribusi Daerah, berupa pemungutan uang sebagai pembayaran pemakaian karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah, baik yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan pemerintah daerah dan berdasarkan peraturan daerah.
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dari pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain : bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain berupa penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

C. Indikator-Indikator Penilaian Pajak dan Retribusi Daerah

Ada beberapa indikator yang biasa digunakan untuk menilai Pajak dan Retribusi daerah, yaitu (Halim, 2004: 96) :

1. Hasil (*Yield*)

Hasil (*Yield*) yaitu memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besarnya hasil pajak tersebut, perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, penambahan penduduk, penambahan pendapatan dan sebagainya.

2. Keadilan (*Equity*)

Dalam hal ini dasar pajak dan kewajiban membayarnya harus jelas dan tidak sewenang-wenang; pajak harus adil secara horizontal, artinya beban pajak harus sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama; adil secara vertikal artinya beban pajak harus lebih banyak ditanggung oleh kelompok yang memiliki sumberdaya yang lebih besar; dan pajak / retribusi haruslah adil dari suatu daerah ke daerah lain, kecuali memang suatu daerah mampu memberikan fasilitas pelayanan sosial yang lebih tinggi.

3. Efisiensi ekonomi

Pajak / Retribusi Daerah hendaknya mendorong atau setidaknya tidak menghambat penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan

konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung; dan memperkecil "beban lebih" pajak.

4. Kemampuan melaksanakan (*Ability to Implement*)

Dalam hal ini suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, baik dari aspek politik maupun administratif.

5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*Suitability as local revenue source*)

Ini berarti, haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan; dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak; pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain; pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah dari segi potensi ekonomi masing-masing; dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

D. Pajak

1. Pengertian dan Fungsi Pajak

Masalah pajak adalah masalah negara dan setiap orang yang hidup dalam suatu negara pasti berurusan dengan pajak, oleh karena itu masalah pajak juga menjadi masalah seluruh rakyat dalam negara tersebut. Dengan demikian setiap anggota masyarakat harus tahu segala permasalahan yang menyangkut pajak, baik tentang asas-asasnya, jenis / macam-macam pajak

yang berlaku di negaranya, tata cara pembayaran pajak serta hal dan kewajiban sebagai wajib pajak.

Definisi atau penertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pendapatan (1990: 5) adalah sebagai berikut (Halim, 2004: 129) :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dalam konteks daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. (UU No. 34 tahun 2000).

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- b. Berdasarkan Undang-Undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dilihat dari aspek pemungutannya, pajak mempunyai dua fungsi, yaitu (Halim, 2004: 131):

a. Fungsi *Budgeter*

Fungsi ini terletak dan lazim dilakukan pada sektor publik dan pajak disini merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara / daerah sesuai dengan waktunya dalam rangka membiayai seluruh pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat / daerah.

b. Fungsi Pengaturan.

Merupakan fungsi yang dipergunakan oleh pemerintah pusat / daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berada di luar sektor keuangan negara / daerah, konsep ini paling sering dipergunakan pada sektor swasta.

Berdasarkan kedua jenis fungsi pajak di atas, dapat dipahami atau dimengerti bahwa fungsi *budgeter* pajak dikaitkan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara umumnya dan anggaran pendapatan

belanja daerah pada khususnya dimaksudkan untuk mengisi kas negara / daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat / daerah.

2. Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan secara proporsional, agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dalam pemungutannya. Pemungutan pajak (Musgrave, 1993: 235) harus memenuhi sebagai berikut (Halim, 2004: 132):

a. Syarat keadilan

Pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan hukum mencapai keadilan undang-undang dan pelaksanaannya pemungutannya harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya pemungutannya yakni dengan memberi hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Hal ini memberi jaminan hukum untuk menyatakan keadilan bagi negara maupun warganya.

c. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak tidak sampai mengganggu perekonomian khususnya pada kegiatan perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuhan perekonomian masyarakat.

d. Syarat Finansial

Pemungutan pajak harus efisien dan didasarkan pada fungsi *budgeter* dalam artian biaya pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.

e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak antara lain adalah (Mulyanto, 2007: 23) :

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu :

- Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan

masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Pada dasarnya ada 3 sistem pemungutan pajak yang berlaku, yaitu :

a. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri *Official Assessment System* :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemerintah.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah.

b. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Self Assessment System* :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.

- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Pemerintah dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain pemerintah dan Wajib Pajak.

E. Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah dan Pajak Nasional merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat, sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil.

Pajak secara umum adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena undang-undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak

memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. Dalam konteks daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak Daerah digolongkan ke dalam dua kategori menurut tingkat Pemerintah Daerah, yaitu Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten / Kota.

1. Tarif Pajak Daerah

Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan Pajak Daerah dilakukan secara terpadu dengan Pajak Nasional. Pembinaan dilakukan secara terus-menerus, terutama mengenai objek dan tarif pajak, sehingga antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi. Meskipun beberapa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2000. Daerah Kabupaten / Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi selain yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Berdasar UU 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penerapan tarif Pajak Daerah Kabupaten / Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Penerapan Tarif Pajak

No	Jenis Pajak	Tarif Pajak	Pengenaan Tarif Pajak
1	Pajak Hotel	10%	Atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel
2	Pajak Restoran	10%	Atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran
3	Pajak Hiburan	35%	Atas jumlah pembayaran atau seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan
4	Pajak Reklame	25%	Atas nilai sewa reklame, yang didasarkan atas nilai jual objek pajak reklame dan nilai strategis pemasangan reklame
5	Pajak Penerangan Jalan	10%	Atas nilai jual tenaga listrik yang terpakai
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	20%	Atas nilai jual hasil pengambilan Bahan Galian Golongan C
7	Pajak Parkir	20%	Atas penerimaan penyelenggaraan parkir yang berasal dari pembayaran atau seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir kendaraan bermotor

Sumber : UU 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2. Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Sesuai dengan Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan jenis pajak Kabupaten / Kota.

a. Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel disebutkan beberapa istilah penting, yaitu :

- 1) Pajak Hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan hotel.
- 2) Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap / istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipukul bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
- 3) Pengusaha hotel adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- 4) Pelayanan di hotel yang menjadi obyek pajak antara lain :
 - a) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
 - b) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
 - c) Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus tamu hotel, bukan untuk umum.
 - d) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Beberapa hal yang dikecualikan menjadi obyek pajak hotel adalah :

- a) Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan atau fasilitas tempat tinggal yang tidak menyatu dengan hotel.
 - b) Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren.
 - c) Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.
 - d) Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai oleh umum di hotel.
 - e) Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.
- 5) Subyek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan pembayaran atas pelayanan hotel.
 - 6) Wajib pajak hotel adalah pengusaha hotel.
 - 7) Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.
 - 8) Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10 (sepuluh) persen dari dasar pengenaan pajak.
- b. Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2001 tentang tentang Pajak Restoran disebutkan beberapa istilah penting, yaitu :

- 1) Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan di restoran.

- 2) Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, termasuk rumah makan, lesehan, pedagang kaki lima dan *cafe*.
- 3) Pengusaha restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- 4) Obyek pajak restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan di restoran. Obyek yang dikecualikan menjadi obyek pajak restoran adalah pelayanan boga / *catering* dan pelayanan yang disediakan oleh restoran yang ditetapkan oleh Bupati.
- 5) Subyek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan pembayaran atas pelayanan restoran.
- 6) Wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran.
- 7) Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.
- 8) Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10 (sepuluh) persen dari dasar pengenaan pajak.

F. Potensi Pendapatan Asli Daerah

Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengetahui potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibutuhkan pengetahuan tentang analisis perkembangan

beberapa variabel yang dapat dikendalikan (yaitu variabel-variabel kebijakan dan kelembagaan), dan yang tidak dapat dikendalikan, (yaitu variabel-variabel ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Beberapa variabel yang perlu dianalisis untuk mengetahui potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah (Halim, 2004: 97) :

1. Kondisi awal suatu daerah

Keadaan struktural ekonomi dan sosial suatu daerah sangatlah menentukan, yakni

- a. Besar kecilnya keinginan pemerintah daerah untuk menetapkan pungutan. Hal ini disebabkan karena struktur ekonomi dan sosial suatu masyarakat menentukan tinggi rendahnya tuntutan akan adanya pelayanan publik dalam kuantitas dan kualitas tertentu. Pada masyarakat agraris (berbasis pertanian) misalnya, tuntutan akan ketersediaan fasilitas pelayanan publik dalam kuantitas dan kualitas tertentu akan lebih rendah daripada tuntutan yang ada di masyarakat industri (daerah yang berbasis industri). Pada masyarakat agraris pemerintah tidak akan terpacu untuk menarik pungutan-pungutan dari masyarakat, sementara dalam masyarakat industri pemerintah akan terpacu untuk menarik pungutan-pungutan untuk memenuhi tuntutan akan ketersediaan fasilitas pelayanan publik.
- b. Kemampuan masyarakat untuk membayar segala pungutan-pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Karena perbedaan pada

struktur ekonomi dan sosialnya, kemampuan membayar segala pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi di masyarakat industri daripada masyarakat agraris. Kondisi awal suatu daerah mencakup pengetahuan tentang :

- 1) Kemampuan industri yang ada di daerah.
 - 2) Struktur sosial, politik, dan institusional serta berbagai kelompok masyarakat yang relatif memiliki kekuatan.
 - 3) Kemampuan (kecakapan) administratif, kejujuran dan integritas dari semua cabang-cabang perpajakan pemerintah.
 - 4) Tingkat ketimpangan (ketidakmerataan) dalam distribusi pendapatan. Indikator untuk mengetahui kondisi awal suatu daerah adalah dengan melihat kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB suatu daerah.
2. Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kegiatan ini merupakan upaya memperluas cakupan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam usaha peningkatan cakupan ini, yaitu :

- 1) Menambah objek dan subjek pajak dan atau retribusi.
 - 2) Meningkatkan besarnya penetapan.
 - 3) Mengurangi tunggakan.
3. Perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Riil

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pada kemampuan seseorang untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan logika yang sama, pada tingkat distribusi pendapatan tertentu yang tetap, semakin tinggi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita riil suatu daerah, semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin pengeluaran pembangunan pemerintahnya. Dengan kata lain, semakin tinggi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita riil suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

4. Pertumbuhan Penduduk.

Besarnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat, maka pendapatan yang dapat ditarik akan meningkat. Tetapi pertumbuhan penduduk mungkin tidak mempengaruhi pertumbuhan pendapatan secara proporsional.

5. Tingkat Inflasi

Inflasi akan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penetapannya didasarkan pada omset penjualan, misalnya pajak hotel, pajak restoran. Untuk pajak atau retribusi yang penetapannya didasarkan pada tarif secara tetap, maka inflasi diperlukan dalam pertimbangan perubahan tarif.

6. Penyesuaian Tarif

Peningkatan pendapatan sangat tergantung pada kebijakan penyesuaian tarif. Untuk pajak atau retribusi yang tarifnya ditentukan secara tetap (*flat*), maka dalam penyesuaian tarif perlu mempertimbangkan laju inflasi. Kegagalan untuk menyesuaikan tarif dengan laju inflasi akan menghambat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam rangka penyesuaian tarif retribusi daerah, selain harus memperhatikan laju inflasi, perlu juga ditinjau hubungan antara biaya pelayanan jasa dengan penerimaan PAD.

7. Pembangunan Baru

Penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dapat diperoleh bila pembangunan-pembangunan baru ada, seperti pembangunan pasar, pembangunan terminal, pembangunan jasa pengumpulan sampah, dan lain-lain.

8. Sumber Pendapatan Baru

Adanya kegiatan usaha baru dapat mengakibatkan bertambahnya sumber pendapatan pajak atau retribusi yang sudah ada.

9. Perubahan Peraturan

Adanya peraturan-peraturan baru, khususnya yang berhubungan dengan pajak atau retribusi, jelas akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

G. Efisiensi Pajak

Efisiensi adalah mengukur bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak yang bersangkutan. Tolak ukur yang dipakai dalam menentukan tingkat efisiensi yaitu dengan menggunakan kriteria penilaian pekerja keuangan pada tabel 2.2. berikut ini :

Tabel 2.2 Kriteria Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100 % ke atas	Tidak Efisien
90 % - 100 %	Kurang Efisien
80 % - 90 %	Cukup Efisien
60 % - 80 %	Efisien
Di bawah 60 %	Sangat Efisien

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327, Tahun 1996

H. Efektifitas Pajak

Efektifitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri. Tolak ukur yang dipakai dalam menentukan tingkat efektifitas yaitu dengan menggunakan kriteria penilaian kinerja anggaran pada tabel 2.3 berikut ini

Tabel 2.3 Kriteria Kinerja Anggaran

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Di atas 100 %	Sangat Efektif
90 % - 100 %	Efektif
80 % - 90 %	Cukup Efektif
60 % - 80 %	Kurang Efektif
Kurang dari 60 %	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327, Tahun 1996

I. Elastisitas Pajak

Elastisitas adalah menunjukkan tanggapan dari suatu variabel dependen (tidak bebas) karena adanya perubahan dalam variabel independen (bebas).tertentu. Besarnya koefisien elastisitas ini ditunjukkan oleh perbandingan antara persentase perubahan dalam variabel dependen dengan persentase perubahan variabel independen yang mempengaruhinya.

J. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2001) tentang aspek ekonomi pemungutan pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri di Kabupaten Karanganyar tahun 1999-2000 yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efisiensi pemungutan pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektifitas pemungutan pajak daerah, upaya pajak dari pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa tingkat efisiensi pemungutan pajak daerah selama periode penelitian menunjukkan sudah efisien dengan nilai rasio 0,07 per tahun. Pemungutan pajak daerah yang dilakukan juga sudah efektif dengan nilai rasio rata-rata 1,08 per tahun. Laju pertumbuhan upaya pajak dari pajak daerah menunjukkan peningkatan yang berarti dengan nilai rata-rata 0,1391 per tahun. Elastisitas perubahan penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan bersifat inelastis dengan nilai koefisien elastisitas 0,77 setiap tahunnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Pramudiastuti (2007) tentang analisis kinerja dan potensi pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Sukoharjo tahun 2003 s/d 2006. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa persentase kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan kecenderungan yang menurun dan tingkat efektivitas pajak hotel dan pajak restoran kurang efektif.

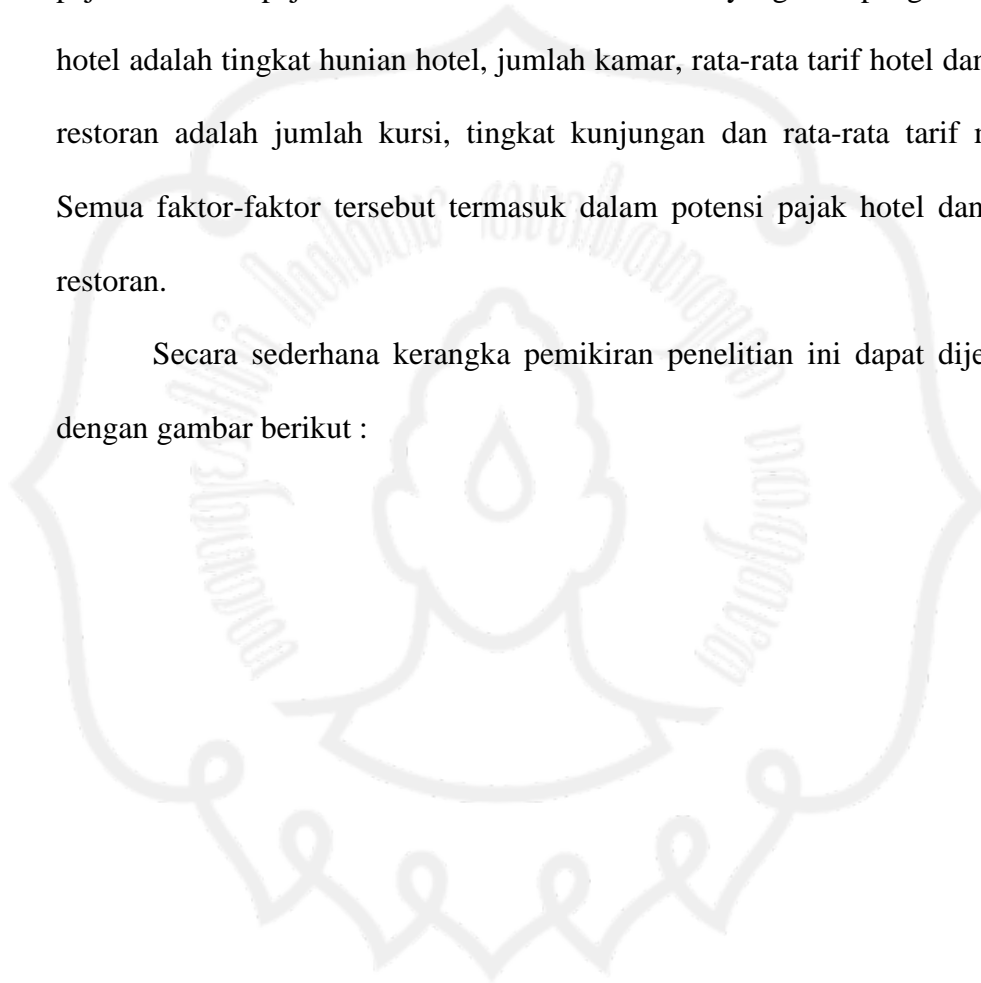
Penelitian yang dilakukan oleh Zurniwati (2001) tentang peranan pengendalian terhadap penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dalam menunjang pembangunan Kota Payakumbuh. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa selama tahun anggaran 1994/1995 hingga 1998/1999, kontribusi pajak hotel dan restoran Kota Payakumbuh mengalami peningkatan cukup baik dengan kontribusi rata-rata terhadap total pajak daerah sebesar 20 %.

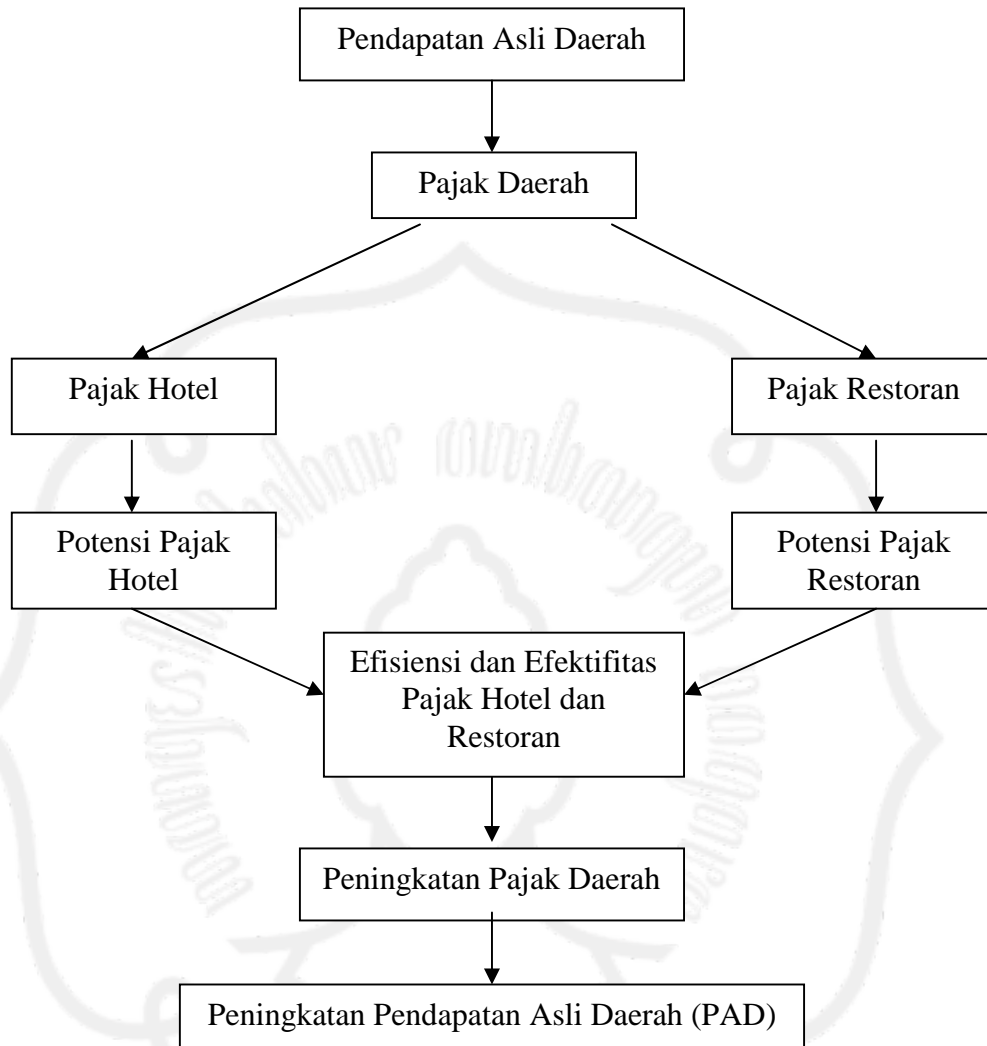
Penelitian yang dilakukan oleh Daud (2004) tentang efisiensi dan efektifitas pajak hotel dan pajak restoran dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kendari. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa selama tahun anggaran 1996/1997 sampai dengan 2000/2001, rata-rata laju pertumbuhan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Kendari adalah 23,5 % per tahun, sedangkan rata-rata kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah adalah sebesar 0,18 %. Efektifitas pajak hotel dan restoran Kabupaten Kendari dengan tahun sampel 2000, diperoleh sebesar 3,80 %, sedangkan tingkat efisiensinya adalah 96,13 %.

K. Kerangka Pemikiran

Salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah. Salah satu upaya dari pemerintah daerah dalam meningkatkan pajak daerah adalah mengefektifkan dan mengefisiensikan pada sektor pendapatan pajak hotel dan pajak restoran dimana faktor-faktor yang mempengaruhi pajak hotel adalah tingkat hunian hotel, jumlah kamar, rata-rata tarif hotel dan pajak restoran adalah jumlah kursi, tingkat kunjungan dan rata-rata tarif makan. Semua faktor-faktor tersebut termasuk dalam potensi pajak hotel dan pajak restoran.

Secara sederhana kerangka pemikiran penelitian ini dapat dijelaskan dengan gambar berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Apabila potensi pajak hotel dan pajak restoran tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan realisasi pendapatan pajak hotel dan pajak restoran yang diterima serta semakin kecil biaya pemungutan pajak hotel dan pajak restoran yang dikeluarkan maka pajak hotel dan pajak restoran tersebut telah efektif dan efisien. Dengan efektif dan efisiennya pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran maka dihasilkan pendapatan pajak hotel dan pajak restoran yang maksimal, dimana

diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pajak daerah. Sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi dapat membiayai pembangunan daerah secara maksimal. Oleh karena itu efektivitas, efisiensi dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran sangat diperlukan untuk meningkatkan pajak daerah.

L. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka tersebut di atas, maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) diduga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
2. Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pajak daerah diduga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
3. Realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran diduga belum mencerminkan potensi yang ada serta masih dapat diupayakan peningkatannya.
4. Pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Karanganyar diduga sudah dilaksanakan secara efektif dan efisien.
5. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diduga elastis terhadap pajak hotel dan pajak restoran.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka yang mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah dengan menggunakan analisis data sekunder tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 tentang pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Karanganyar.

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dikategorikan sebagai data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber dengan cara mengambil data-data statistik yang telah ada serta dokumen-dokumen lain yang terkait dan diperlukan yang dihimpun melalui :

1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar.
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
3. Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar tahun 2004 sampai dengan 2008.
2. Penerimaan pajak daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2004 sampai dengan 2008.

3. Daftar hotel dan restoran di Kabupaten Karanganyar tahun 2008.
4. Penerimaan pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Karanganyar tahun 2004 sampai dengan 2008.

C. Definisi Operasional Variabel

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Penjelasan UU No. 33 Tahun 2004).

2. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan, kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

3. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap / istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya

dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

4. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, termasuk rumah makan, lesehan, pedagang kaki lima dan kafe.

5. Kontribusi

Kontribusi adalah sumbangan yang diberikan oleh pajak hotel dan pajak restoran untuk penerimaan pajak daerah maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD).

6. Efisiensi

Efisiensi adalah mengukur bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak yang bersangkutan.

7. Efektifitas

Efektifitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri.

8. Potensi

Potensi adalah segala kemampuan dan kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dalam keadaan 100 persen.

9. Elastisitas

Elastisitas adalah ukuran derajat kepekaan terhadap suatu perubahan dari salah satu faktor yang mempengaruhinya.

D. Metode Analisis Data

Dalam usaha mencapai tujuan penelitian dan menguji hipotesis, maka digunakan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif yaitu dengan menggunakan analisis efisiensi, efektifitas, kontribusi, potensi dan upaya fiskal. Untuk mengukur kinerja hasil pengupayaan pajak hotel dan pajak restoran digunakan tolak ukur administrasi, yaitu efisiensi dan efektifitas (Devas, 1989).

1. Analisis Efisiensi Pajak

Analisis ini digunakan untuk mengukur bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutupi biaya pemungutan pajak. Apakah besarnya biaya pungut yang dikeluarkan sesuai dengan realisasi penerimaan pajak.

Rumus Efisiensi Pajak Hotel adalah (Halim, 2004) :

$$\text{Efisiensi Pajak Hotel} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100 \%$$

Rumus Efisiensi Pajak Restoran adalah (Halim, 2004) :

$$\text{Efisiensi Pajak Restoran} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100 \%$$

Apabila hasil analisis mendekati 1 % atau yang kecil, maka hipotesis yang menyatakan bahwa pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Karanganyar efisien terbukti.

2. Analisis Efektifitas Pajak

Analisis ini digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak terhadap potensi penerimaan pajak yang bersangkutan.

Rumus Efektifitas Pajak Hotel adalah (Halim, 2004) :

$$\text{Efektifitas Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Potensi Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100 \%$$

Rumus Efektifitas Pajak Restoran adalah (Halim, 2004) :

$$\text{Efektifitas Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Potensi Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100 \%$$

Apabila hasil perhitungan efektifitas pajak hotel dan pajak restoran menunjukkan angka yang besar atau persentase yang mendekati 100 %, maka hipotesis yang menyatakan bahwa penerimaan pajak hotel dan pajak restoran sudah dikelola secara efektif terbukti.

3. Analisis Kontribusi Pajak

Analisis ini digunakan untuk mengetahui kontribusi suatu pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Daerah.

Rumus yang digunakan untuk melihat Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD adalah (Halim, 2004) :

$$\text{Kontribusi Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \%$$

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \%$$

Rumus yang digunakan untuk melihat Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah adalah (Halim, 2004) :

$$\text{Kontribusi Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

4. Analisis Potensi Pajak

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar potensi yang dimiliki oleh hotel dan restoran. Data atau informasi yang diperlukan untuk menghitung potensi pajak hotel dan pajak restoran adalah dengan mengamati variabel-variabel yang secara langsung mempengaruhi aspek

penerimaan saja. Beberapa variabel dianggap relevan untuk perhitungan potensi pajak hotel yaitu jumlah kamar yang tersedia, frekuensi penyewaan kamar, tarif sewa kamar selama periode tertentu (misal 1 bulan / 1 tahun), sedangkan untuk pajak restoran yaitu jumlah kursi (jumlah rumah makan / restoran), frekuensi pembeli datang serta harga makanan selama periode waktu tertentu (misal 1 bulan / 1 tahun). Adapun formulasi untuk menghitung potensi pajak hotel dan pajak restoran adalah :

Rumus Potensi Pajak Hotel (Mardiasmo, Makfatih, 2000) :

$$\text{Potensi Pajak Hotel} = \text{Jumlah Kamar} \times \text{Tingkat Hunian} \times \text{Tarif Kamar} \times \\ \text{Jumlah Hari} \times \text{Jumlah Bulan} \times 10 \%$$

Keterangan :

- Jumlah kamar yang ada di hotel
- Tingkat Hunian = Secara umum tingkat hunian dibagi menjadi tiga bagian yaitu optimis (ramai) sebesar 80 %, biasa (sedang) sebesar 40 %, pesimis (sangat sepi) sebesar 20 %. Oleh sebab itu diambil rata-ratanya menjadi 46 %.
- Rata-rata tarif kamar berdasarkan klasifikasi hotel
- Jumlah Hari = 16 hari merupakan asumsi bahwa dalam sebulan hotel dihuni selama 16 hari.
- Jumlah Bulan = 9 bulan diasumsikan hotel dihuni pada tingkat hunian ramai dan sedang sehingga pada saat tingkat hunian sangat sepi pajak hotel tidak dipungut.
- 10 % adalah tarif pajak hotel.

Rumus Potensi Pajak Restoran (Mardiasmo, Makfatih, 2000) :

$$\text{Potensi Pajak Restoran} = \text{Jumlah Kursi} \times \text{Tingkat Kunjungan} \times \text{Tarif Rata-rata} \\ \times \text{Jumlah Hari} \times \text{Jumlah Bulan} \times 10 \%$$

Keterangan :

- Jumlah kursi yang ada di restoran / rumah makan.
- Tingkat kunjungan restoran / rumah makan berkisar antara 50%-70%, sehingga untuk menyederhanakan dibagi menjadi tiga bagian yaitu tingkat hunian optimis (70 %), biasa (60 %), dan pesimis (50 %). Sehingga diambil rata-rata tingkat kunjungan sebesar 60 %.
- Rata-rata pengeluaran tamu yaitu rata-rata uang yang dikeluarkan tamu untuk sekali makan minum per orang sekali makan.
- 30 hari merupakan asumsi bahwa restoran / rumah makan buka setiap hari selama satu tahun.
- 12 bulan untuk menghitung potensi pajak restoran selama satu tahun.
- 10 % adalah tarif pajak restoran.

5. Analisis Elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Analisis ini digunakan untuk mengetahui atau menggambarkan besarnya derajat kepekaan dan tingkat perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat adanya perubahan pada jumlah pajak hotel dan pajak restoran.

Elastisitas PAD terhadap Pajak Hotel yaitu persentase perubahan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disebabkan oleh persentase perubahan penerimaan pajak hotel.

Rumus Elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pajak Hotel dan Pajak Restoran adalah (Soedarsono, 1986)

$$E = \frac{\text{Persentase Perubahan PAD}}{\text{Persentase Perubahan Pajak Hotel}}$$

$$E = \frac{\% \Delta PAD}{\% \Delta PajakHotel}$$

Dimana :

E = Elastisitas

$\Delta PajakHotel$ = Perubahan Penerimaan Pajak Hotel

ΔPAD = Perubahan PAD

Elastisitas PAD terhadap Pajak Restoran yaitu persentase perubahan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disebabkan oleh persentase perubahan penerimaan pajak restoran.

$$E = \frac{\text{Persentase Perubahan PAD}}{\text{Persentase Perubahan Pajak Restoran}}$$

$$E = \frac{\% \Delta PAD}{\% \Delta Pajak Restoran}$$

Dimana :

E = Elastisitas

$\Delta Pajak Restoran$ = Perubahan Penerimaan Pajak Restoran

ΔPAD = Perubahan PAD

Dalam perhitungan menggunakan elastisitas tersebut akan diperoleh tiga kemungkinan hasil perhitungan, yaitu :

1. $E > 1$ (Elastis)

Artinya apabila pajak hotel dan pajak restoran (variabel independen) mengalami perubahan sebesar 1 % maka PAD (variabel dependen) akan mengalami kenaikan perubahan lebih dari 1 %.

2. $E < 1$ (Inelastis)

Artinya apabila pajak hotel dan pajak restoran (variabel independen) mengalami perubahan sebesar 1 % maka PAD (variabel dependen) akan mengalami perubahan kurang dari 1 %.

3. $E = 1$ (Unitary elastis)

Artinya apabila pajak hotel dan pajak restoran (variabel independen) mengalami perubahan sebesar 1 % maka PAD (variabel dependen) akan mengalami perubahan sebesar 1 % atau besarnya perubahan variabel independen (kenaikan / penurunan) sama dengan perubahan variabel dependen.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Karanganyar

1. Keadaan Geografis

a. Letak Geografis

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Kabupaten Sragen di sebelah utara, Propinsi Jawa Timur di sebelah timur, Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo di sebelah selatan dan Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali di sebelah barat. Bila dilihat dari garis bujur dan garis lintang, maka Kabupaten Karanganyar terletak antara $110^{\circ}40'' - 110^{\circ}70''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}28'' - 7^{\circ}46''$ Lintang Selatan. Ketinggian rata-rata 511 meter di atas permukaan air laut serta beriklim tropis dengan temperatur $22^{\circ} - 31^{\circ}$.

b. Curah Hujan

Berdasarkan data dari 6 stasiun pengukur yang ada di Kabupaten Karanganyar, banyaknya hari hujan selama tahun 2008 adalah 95 hari dengan rata-rata curah hujan 2.453 mm, dimana curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret dan terendah pada Bulan Juli, Agustus dan September.

c. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Karanganyar adalah 77.378,64 Ha, yang terdiri dari luas tanah sawah 22.474,91 Ha dan luas tanah kering 54.902,73 Ha. Tanah sawah terdiri dari irigasi teknis 12.929,62 Ha, non teknis 7.587,62 Ha, dan tidak berpengairan 1.957,67 Ha. Sementara itu, luas tanah untuk pekarangan / bangunan 21.171,97 Ha dan luas untuk tegalan / kebun 17.863,40 Ha. Di Kabupaten Karanganyar terdapat hutan negara seluas 9.729,50 Ha dan perkebunan seluas 3.251,50 Ha.

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kabupaten Karanganyar Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Km ²)
1	Jatipuro	40,36
2	Jatiyoso	67,16
3	Jumapolo	55,67
4	Jumantono	53,55
5	Matesih	26,27
6	Tawangmangu	70,03
7	Ngargoyoso	65,34
8	Karangpandan	34,11
9	Karanganyar	43,03
10	Tasikmadu	27,60
11	Jaten	25,55
12	Colomadu	15,64
13	Gondangrejo	56,80
14	Kebakkramat	36,46
15	Mojogedang	53,31
16	Kerjo	46,82
17	Jenawi	56,08
	Karanganyar	773,78

Sumber : Karanganyar Dalam Angka 2009.

2. Pemerintahan

a. Pembagian Wilayah Administrasi

Kabupaten Karangnayar terdiri dari 17 kecamatan yang meliputi 177 desa / kelurahan (15 kelurahan dan 162 desa). Desa / Kelurahan tersebut terdiri dari 1.091 dusun, 2.313 dukuh, 1.876 RW dan 6.130 RT. Klasifikasi desa / kelurahan pada tahun 2008 terdiri dari swadaya 14 desa / kelurahan, swakarya 125 desa / kelurahan dan swasembada 177 desa / kelurahan.

3. Penduduk dan Tenaga Kerja

a. Kependudukan

Jumlah penduduk di Kabupaten Karangnayar berdasarkan registasi tahun 2008 sebanyak 865.580 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 429.852 jiwa dan perempuan 435.728 jiwa. Dibandingkan tahun 2007, maka terdapat penambahan penduduk sebanyak 14,214 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 1,67 %.

Kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Karangnayar, yaitu 75.796 jiwa (8,76 %), kemudian Kecamatan Jaten, yaitu 70.770 jiwa (8,18 %) dan Kecamatan Gondangrejo yaitu 68.571 jiwa (7,92 %). Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Jenawi, yaitu 27.656 jiwa (3,20 %), kemudian Kecamatan Ngargoyoso yaitu 35.351 jiwa (4,08 %) dan Kecamatan Kerjo, yaitu 37.380 jiwa (4,32 %).

Tabel 4.2 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Karanganyar Tahun 2004 – 2008

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk
2004	830.64	0.90
2005	838.182	0.91
2006	844.634	0.75
2007	851.366	0.85
2008	865.58	1.67

Sumber : Karanganyar Dalam Angka 2009.

Tabel 4.3 Penduduk menurut Kecamatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2008

Kecamatan	Jumlah Penduduk
Jenawi	27.656
Kerjo	37.380
Mojogedang	65.051
Kebakkramat	58.973
Gondangrejo	68.571
Colomadu	60.828
Jaten	70.770
Tasikmadu	55.842
Karanganyar	75.796
Karangpandan	43.247
Ngargoyoso	35.351
Tawangmangu	45.182
Matesih	46.131
Jumantono	48.879
Jumapolo	47.441
Jatiyoso	40.422
Jatipuro	38.060

Sumber : Karanganyar Dalam Angka 2009.

Tabel 4.4 Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur Kabupaten Karanganyar Tahun 2008

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk	
	Laki-laki	Perempuan
0-4	35.153	34.312
5-9	37.172	36.523
10-14	39.266	38.829
15-19	41.051	40.837
20-24	38.512	38.437
25-29	35.976	36.039
30-34	33.139	33.246
35-39	30.387	30.544
40-44	27.244	27.450
45-49	23.892	24.141
50-54	20.364	20.821
55-59	17.533	18.209
60-64	15.336	16.246
65-69	13.316	14.544
70-74	11.209	12.926
75 +	10.302	12.624

Sumber : Karanganyar Dalam Angka 2009.

Dilihat dari golongan umur lima tahunan, maka penduduk Kabupaten Karanganyar masih menyerupai piramida. Penduduk 4 golongan pertama (0-19) menunjukkan adanya kenaikan, tetapi golongan selanjutnya (20 dan seterusnya) menunjukkan adanya penurunan, seperti terlihat pada gambar.

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, keluarga juga bertambah. Pada tahun 2008 tercatat sebanyak 221.949 keluarga atau mengalami pertumbuhan 1,44 % dari tahun 2007. Rata-rata banyaknya anggota keluarga sedikit meningkat, dimana pada tahun 2008 sebesar 3,90 %.

Seiring dengan kenaikan penduduk, maka kepadatan penduduk juga mengalami kenaikan. Pada tahun 2008 kepadatan penduduk Kabupaten Karanganyar mencapai 1.110 jiwa / Km^2 .

Di sisi lain, persebaran penduduk masih belum merata. Kepadatan penduduk di daerah perkotaan secara umum lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan. Kecamatan dengan kepadatan penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Colomadu, yaitu 3.889 jiwa / Km^2 dan yang paling rendah adalah Kecamatan Jenawi, yaitu 493 jiwa / Km^2 .

b. Tenaga Kerja

Sesuai dengan kondisi alam Kabupaten Karanganyar yang agraris, maka sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian di sektor pertanian (petani sendiri dan buruh tani), yaitu 222.794 orang (30,83 %). Kemudian sebagai buruh industri sebanyak 104.204 orang (14,65 %), buruh bangunan 49.099 orang (6,90 %) dan pedagang sebanyak 44.762 orang (6,19 %). Selebihnya adalah sebagai pengusaha, di sektor pengangkutan, PNS / TNI / Polri, pensiunan, jasa-jasa dan lain-lain.

Menurut data dari Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KTT), Kabupaten Karanganyar pada tahun 2008 jumlah pencari kerja tercatat sebanyak 12.245 orang dengan rincian laki-laki 5.554 orang dan perempuan 6.691 orang. Dibandingkan tahun 2007, maka ada peningkatan pencari kerja di hampir semua jenjang pendidikan yang terdaftar di Dinas KTT Kabupaten Karanganyar. Dari jumlah tersebut,

lulusan SLTA tercatat yang paling besar, yaitu 3.689 orang (46,46 %) dan paling sedikit adalah lulusan SD, yaitu 130 orang (1,06 %). Pencari kerja yang sudah ditempatkan pada tahun 2008 sebanyak 1.382 orang. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pencari kerja yang belum mendapatkan pekerjaan.

4. Industri dan Perdagangan

a. Industri

Pada tahun 2008 di Kabupaten Karanganyar terdapat industri besar (tenaga kerja \geq 100 orang) sebanyak 78 unit dan industri sedang (tenaga kerja = 21-99 orang) sebanyak 104 unit. Dari 182 industri besar / sedang tersebut mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 41.823 orang. Industri besar / sedang yang paling banyak adalah produk tekstil / bahan dari tekstil yaitu 61 unit (33,52 %), industri makanan / bahan makanan 32 unit (17,58 %) dan industri plastik / kimia 19 unit (10,44 %).

Kondisi politik dan perekonomian yang berangsur-angsur membaik di Negara Indonesia ini menyebabkan sektor industri dan perdagangan akan kembali berkembang. Jumlah perusahaan maupun tenaga kerja di tahun 2008 relatif sama bila dibandingkan dengan tahun 2007.

Menurut data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Karanganyar, pada tahun 2007 banyaknya industri menengah dan besar non fasilitas sebanyak 117 perusahaan dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 23.898 orang dan industri kecil formal sebanyak 699 usaha

dengan jumlah tenaga kerja 10.520 orang. Sedangkan industri kecil non formal (sentra industri dan non sentra industri) sebanyak 9.760 usaha dengan jumlah tenaga kerja 30.329 orang.

Selama tahun 2007, penyerapan inflasi pada industri menengah dan besar sebesar Rp. 2.803.016.677 juta, industri kecil formal dan non formal sebesar Rp. 49.832.903 juta.

b. Perdagangan dan Koperasi

Guna menunjang laju perekonomian di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2007 terdapat pasar 52 buah, toko / kios / warung 9.807 buah, KUD 17 buah dan koperasi simpan pinjam 910 unit. Dibandingkan tahun 2006, khususnya toko / kios / warung dan koperasi simpan pinjam jumlahnya mengalami kenaikan.

Koperasi sebagai soko guru perekonomian di Indonesia, sebagai usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat, fungsi dan perannya semakin besar. Pada tahun 2007 di Kabupaten Karanganyar terdapat koperasi sebanyak 927 unit dengan jumlah anggota mencapai 153.299 orang. Jenis koperasi terbanyak berasal dari golongan masyarakat (KKT dan KSU), yaitu 876 buah, KUD 17 buah, koperasi fungsional 76 buah dan koperasi karyawan 79 buah.

5. Keuangan Daerah, PDRB dan Inflasi

a. Keuangan Daerah

Berdasarkan neraca daerah dan aliran kas Kabupaten Karanganyar tahun anggaran 2008, anggaran pendapatan ditetapkan sebesar Rp.754.751.460.070,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 771.365.016.736,- atau 102,20 %. Dengan rincian sebagai berikut : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan Rp. 58.400.628.420,- dan realisasinya Rp. 64.470.676.168,- (110,39 %); transfer pemerintah pusat (dana perimbangan dan lainnya) dianggarkan Rp. 622.798.763.400,- dan realisasinya Rp. 625.513.131.963,- (111,42 %) dan lain-lain pendapatan yang sah dianggarkan Rp. 28.120.000.000,- dan realisasinya Rp. 30.760.000.000,- (109,39 %).

Untuk belanja operasi dianggarkan Rp. 646.131.989.810,- dan realisasinya Rp. 579.033.727.070,- (89,62 %) dan belanja modal dianggarkan Rp. 160.914.797.807,- dan terealisasi Rp. 149.886.535.905,- (93,15 %), belanja tidak terduga dianggarkan Rp 5.000.000.000,- dan terealisasi Rp 0,- (0,00%)

Pembiayaan setelah perubahan tahun anggaran 2008 terdiri dari penerimaan daerah dianggarkan Rp. 117.764.858.047,- dan realisasinya Rp. 115.779.858.047,- (98,31 %) dan pengeluaran daerah dianggarkan Rp. 15.193.757.000,- dan realisasinya Rp. 10.528.205.475,- (69,29 %). Dari pengeluaran daerah tersebut terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran

tahun berkenaan dianggarkan sebesar Rp. 0,- dan terealisasi Rp. 103.782.305.568,-.

b. PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2006 Kabupaten Karanganyar atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar 6.904.990,49 (jutaan Rp.) dan atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar 4.654.054,50 (jutaan Rp.). Pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh perkembangan PDRB pada tahun 2006, ADHB sebesar 10,93 % dan ADHK sebesar 5,74 %.

Tabel 4.5 Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kabupaten Karanganyar Tahun 2003-2007

Uraian	2003	2004	2005	2006	2007
ADHB	11.15	11.86	11.37	10.93	10.93
ADHK	3.32	4.03	5.49	5.08	5.74

Sumber : Karanganyar Dalam Angka 2009.

Jika dilihat dari sektor, ADHB maka sektor industri pengolahan mempunyai kontribusi yang paling besar yaitu 52,88 %, kemudian sektor pertanian 19,47 %, sektor perdagangan 10,09 %, sektor jasa-jasa 8,03 % dan sektor-sektor lain kurang dari 5 %.

c. Inflasi

Selama tahun 2008, inflasi di Kabupaten Karanganyar mencapai 10,83 %. Inflasi tertinggi jatuh pada bulan Juni sebesar 2,34 % dan

terendah pada bulan Desember sebesar 0,54 %. Penyumbang inflasi terbesar adalah kelompok bahan makanan yang mencapai 20,17 %, kemudian kelompok kesehatan sebesar 13,55 % dan ketiga adalah kelompok transportasi dan komunikasi sebesar 9,28 %. Sedangkan penyumbang terendah adalah kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga yaitu 2,49 % dan kelompok sandang sebesar 3,23 %.

Tabel 4.6 Inflasi di Kabupaten Karanganyar Tahun 2004-2008

Tahun	2004	2005	2006	2007	2008
Inflasi	5.31	14.20	6.41	4.09	10.83

Sumber : Karanganyar Dalam Angka 2009.

6. Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Karanganyar. Sektor pariwisata merupakan sektor yang memberikan sumbangan terbesar ketiga bagi penerimaan daerah setelah posisi pertama dan kedua ditempati oleh sektor industri pengolahan dan sektor pertanian. Pada PDRB Kabupaten Karanganyar, sektor pariwisata dikategorikan ke dalam sektor perdagangan yang di dalamnya terdapat hotel dan restoran sebagai salah satu industri pariwisata yang terdapat di Kabupaten Karanganyar.

Obyek wisata atau yang sering disebut dengan Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) yang ada di wilayah Kabupaten Karanganyar

dikelompokkan dalam obyek wisata alam, budaya dan buatan. Obyek wisata alam, budaya dan buatan antara lain :

1) Obyek Wisata Alam

- a) Taman Wisata
- b) Taman Wisata Tirta
- c) Hutan Wisata : Hutan Puncak Lawu, Hutan Wisata Pringgodani, Hutan Wisata Sekipan, Hutan Wisata Gunung Bromo, Hutan Wisata Grojogan Sewu.
- d) Wisata Alam : Wisata Alam Monumen Tanah Kritis, Wisata Alam Sendang Kuning, Wisata Alam Air Terjun Temanten, Wisata Alam Tlogo Madirdo, Air Terjun Jumok.
- e) Sumber Air Panas : Sumber Air Panas Pablengan, Sumber Air Panas Balong, Sumber Air Panas Cumpleng.
- f) Goa : Goa Cokrokembang, Goa Selo Umeng, Goa Tlorong.
- g) Bumi Perkemahan : Bumi Pramuka Delingan, Camping Lawu Resort.

2) Obyek Wisata Budaya

- a) Peninggalan Purbakala : Candi Sukuh, Candi Ceto, Candi Palanggatan, Situs Menggung, Situs Watukandang, Situs Penggalan Fosil Dayu.
- b) Tempat Ziarah : Astana Mangadeg, Astana Girilayu, Astana Giribangun, Astana Derpoyudan, Astana Temuireng, Astana

Randusongo, Krendhowahono, Bulak Kragan, Jabal Kanil, Pringgondani, Tal Pitu, Pemacekan

c) Bangunan Bersejarah : Kamar mandi Keputren Sapta Tirta Pablengan, Sondokoro, Giyanti, RRI.

d) Obyek Wisata Buatan

- Waduk / Dam / Bendung : Waduk Lalung, Waduk Delingan, Waduk Plalar, Dam Kricikan
- Taman Ria : Balekambang, Camping Lawu Resort.

Selain itu terdapat juga usaha rekreasi dan hiburan umum yang dikelola oleh BUMD dan swasta.

Selama tahun 2008, jumlah pengunjung ke seluruh obyek wisata mencapai 563.218 orang dengan obyek yang paling banyak dikunjungi adalah Grojogan Sewu di Tawangmangu dengan jumlah pengunjung sebanyak 285.974 orang (50,78 %), kemudian Kolam Renang Intan Pari di Karanganyar 126.809 orang (22,34 %), Air Terjun Jumog di Kecamatan Nargoyoso sebanyak 46.439 orang (8,25 %) dan Taman Ria Bale Kambang di Tawangmangu 20.206 orang (3,59 %).

Disamping obyek-obyek wisata, di Kabupaten Karanganyar terdapat hotel bintang 5 sebanyak 1 buah, hotel bintang 1-2 sebanyak 3 buah, hotel melati 39 buah dan pondok wisata 2 buah.

B. Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk melihat seberapa besar pajak hotel dan pajak restoran berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka perlu dilakukan analisis kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap realisasi penerimaan PAD. Oleh karena itu, untuk melakukan analisis tersebut maka dapat dilakukan analisis kontribusi pajak hotel terhadap PAD dan analisis kontribusi pajak restoran terhadap PAD

1. Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Analisis kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan untuk melihat seberapa besar pajak hotel berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun formulanya sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \%$$

Analisis ini digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil penerimaan pajak hotel dengan total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tabel 4.7 berikut dapat dilihat perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 4.7 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2004 s/d 2008

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Hotel	PAD	Kontribusi	Laju Pertumbuhan
	(Rp)	(Rp)	(%)	
2004	261.472.173	29.485.262.726	0,89	13,78
2005	325.695.699	34.302.565.951	0,95	24,56
2006	377.673.020	46.052.120.123	0,82	15,96
2007	440.428.766	56.889.064.224	0,77	16,62
2008	575.420.710	64.470.676.168	0,89	30,65
Rata-Rata	396.138.074	46.239.937.838	0,86	20,31

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Karanganyar, diolah.

Dari tabel 4.7 tersebut maka dapat dilihat bahwa kontribusi pajak hotel terhadap PAD mengalami fluktuasi. Pada tahun 2004, laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel adalah 13,78 persen dengan kontribusi pajak hotel terhadap PAD adalah sebesar 0,89 persen atau sebesar Rp 261.472.173,- dari PAD sebesar Rp 29.485.262.726,-. Pada tahun 2005, laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel adalah 24,56 persen dengan kontribusi pajak hotel terhadap PAD sebesar 0,95 persen atau sebesar Rp 325.695.699,- dari PAD sebesar Rp 34.302.565.951,-. Pada tahun 2006, laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel adalah 15,96 persen dengan kontribusi pajak hotel terhadap PAD sebesar 0,82 persen atau sebesar Rp 377.673.020,- dari PAD sebesar Rp 46.052.120.123,-. Pada tahun 2007, laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel adalah 16,62 persen dengan kontribusi pajak hotel terhadap PAD sebesar 0,77 persen atau sebesar Rp 440.428.766,- dari PAD sebesar Rp 56.889.064.224,-. Pada tahun 2008, laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel adalah 30,65 persen

dengan kontribusi pajak hotel terhadap PAD sebesar 0,89 persen atau sebesar Rp 575.420.710,- dari PAD sebesar Rp 64.470.676.168,-.

Dilihat dari rata-rata keseluruhan selama lima tahun terakhir, peranan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum memberikan kontribusi yang cukup berarti, kalau dilihat dengan angka rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 0,86 persen dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2004 sampai dengan 2008. Selain itu, rata-rata laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel selama empat tahun di Kabupaten Karanganyar adalah 20,31 persen per tahun.

2. Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Analisis kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan untuk melihat seberapa besar pajak restoran berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun formulanya sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \%$$

Analisis ini digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil penerimaan pajak restoran dengan total penerimaan Pendapatan Asli

Daerah (PAD). Pada tabel 4.8 berikut dapat dilihat perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 4.8 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2004 s/d 2008

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Restoran	PAD	Kontribusi	Laju Pertumbuhan
	(Rp)	(Rp)	(%)	
2004	156.684.543	29.485.262.726	0,53	13,51
2005	201.345.473	34.302.565.951	0,59	28,50
2006	227.795.587	46.052.120.123	0,49	13,14
2007	254.303.867	56.889.064.224	0,45	11,64
2008	367.613.892	64.470.676.168	0,57	44,56
Rata-Rata	241.548.672	46.239.937.838	0,53	22,27

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Karanganyar, diolah.

Dari tabel 4.8 tersebut maka dapat dilihat bahwa kontribusi pajak restoran terhadap PAD mengalami fluktuasi. Pada tahun 2004, kontribusi pajak restoran terhadap PAD adalah sebesar 0,53 persen atau sebesar Rp 156.684.543,- dari PAD sebesar Rp 29.485.262.726. Pada tahun 2005, laju pertumbuhan penerimaan pajak restoran adalah 28,50 persen dengan kontribusi pajak restoran terhadap PAD sebesar 0,59 persen atau sebesar Rp 201.345.473,- dari PAD sebesar Rp 34.302.565.951,-. Pada tahun 2006, laju pertumbuhan penerimaan pajak restoran adalah 13,14 persen dengan kontribusi pajak restoran terhadap PAD sebesar 0,49 persen atau sebesar Rp 227.795.587,- dari PAD sebesar Rp 46.052.120.123,-. Pada tahun 2007, laju pertumbuhan penerimaan pajak restoran adalah 11,64 persen dengan kontribusi pajak restoran terhadap PAD sebesar 0,45 persen

atau sebesar Rp 254.303.867,- dari PAD sebesar Rp 56.889.064.224,-. Pada tahun 2008, laju pertumbuhan penerimaan pajak restoran adalah 44,56 persen dengan kontribusi pajak restoran terhadap PAD sebesar 0,57 persen atau sebesar Rp 367.613.892,- dari PAD sebesar Rp 64.470.676.168,-.

Dilihat dari rata-rata keseluruhan selama 5 (lima) tahun terakhir, peranan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum memberikan kontribusi yang cukup berarti, kalau dilihat dengan angka rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 0,53 persen dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2004 sampai dengan 2008. Selain itu, rata-rata laju pertumbuhan penerimaan pajak restoran selama empat tahun di Kabupaten Karanganyar adalah 24,46 persen per tahun.

C. Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah

Untuk melihat seberapa besar pajak hotel dan pajak restoran berkontribusi terhadap pajak daerah, maka perlu dilakukan analisis kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap realisasi penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, untuk melakukan analisis tersebut maka dapat dilakukan analisis kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dan analisis kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah.

1. Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah

Analisis kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dilakukan untuk melihat seberapa besar pajak hotel berkontribusi terhadap pajak daerah. Adapun formulanya sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

Analisis ini digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil penerimaan pajak hotel dengan total penerimaan pajak daerah. Pada tabel 4.9 berikut dapat dilihat perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah.

Tabel 4.9 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2004 s/d 2008

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Hotel	Pajak Daerah	Kontribusi
	(Rp)	(Rp)	(%)
2004	261.472.173	11.572.405.687	2,26
2005	325.695.699	13.158.093.041	2,48
2006	377.673.020	14.543.182.743	2,60
2007	440.428.766	19.053.558.538	2,31
2008	575.420.710	21.874.872.161	2,63
Rata-Rata	396.138.074	16.040.422.434	2,45

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Karanganyar, diolah.

Dari tabel 4.9 tersebut maka dapat dilihat bahwa kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2004, kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah adalah sebesar 2,26 persen atau sebesar Rp 261.472.173,- dari pajak daerah sebesar Rp

11.572.405.687,-. Pada tahun 2005, kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 9,73 persen dari tahun sebelumnya, yaitu dengan kontribusi sebesar 2,48 persen atau sebesar Rp 325.695.699,- dari pajak daerah sebesar Rp 13.158.093.041,-. Pada tahun 2006, kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 4,84 persen dari tahun sebelumnya, yaitu dengan kontribusi sebesar 2,60 persen atau sebesar Rp 377.673.020,- dari pajak daerah sebesar Rp 14.543.182.743,-. Pada tahun 2007, kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah mengalami penurunan sebesar 11,15 persen dari tahun sebelumnya, yaitu dengan kontribusi sebesar 2,31 persen atau sebesar Rp 440.428.766,- dari pajak daerah sebesar Rp 19.053.558.538,-. Pada tahun 2008, kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 13,85 persen dari tahun sebelumnya, yaitu dengan kontribusi sebesar 2,63 persen atau sebesar Rp 575.420.710,- dari pajak daerah sebesar Rp 21.874.872.161,-.

Dilihat dari rata-rata keseluruhan selama 5 (lima) tahun terakhir, peranan pajak hotel terhadap pajak daerah belum memberikan kontribusi yang cukup berarti, kalau dilihat dengan angka rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah adalah sebesar 2,45 persen dari total penerimaan pajak daerah pada tahun 2004 sampai dengan 2008.

2. Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah

Analisis kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah dilakukan untuk melihat seberapa besar pajak restoran berkontribusi terhadap pajak daerah. Adapun formulanya sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

Analisis ini digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil penerimaan pajak restoran dengan total penerimaan pajak daerah. Pada tabel 4.10 berikut dapat dilihat perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah.

Tabel 4.10 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2004 s/d 2008

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Restoran	Pajak Daerah	Kontribusi
	(Rp)	(Rp)	(%)
2004	156.684.543	11.572.405.687	1,35
2005	201.345.473	13.158.093.041	1,53
2006	227.795.587	14.543.182.743	1,57
2007	254.303.867	19.053.558.538	1,33
2008	367.613.892	21.874.872.161	1,68
Rata-Rata	241.548.672	16.040.422.434	1,49

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Karanganyar, diolah.

Dari tabel 4.10 tersebut maka dapat dilihat bahwa kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2004, kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah adalah sebesar

1,35 persen atau sebesar Rp 156.684.543,- dari pajak daerah sebesar Rp 11.572.405.687,-. Pada tahun 2005, kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 13,33 persen dari tahun sebelumnya, yaitu dengan kontribusi sebesar 1,53 persen atau sebesar Rp 201.345.473,- dari pajak daerah sebesar Rp 13.158.093.041,-. Pada tahun 2006, kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 2,61 persen dari tahun sebelumnya, yaitu dengan kontribusi sebesar 1,57 persen atau sebesar Rp 227.795.587,- dari pajak daerah sebesar Rp 14.543.182.743,-. Pada tahun 2007, kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah mengalami penurunan sebesar 15,29 persen dari tahun sebelumnya, yaitu dengan kontribusi sebesar 1,33 persen atau sebesar Rp 254.303.867,- dari pajak daerah sebesar Rp 19.053.558.538,-. Pada tahun 2008, kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 26,32 persen dari tahun sebelumnya, yaitu dengan kontribusi sebesar 1,68 persen atau sebesar Rp 367.613.892,- dari pajak daerah sebesar Rp 21.874.872.161,-.

Dilihat dari rata-rata keseluruhan selama 5 (lima) tahun terakhir, peranan pajak restoran terhadap pajak daerah belum memberikan kontribusi yang cukup berarti, kalau dilihat dengan angka rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah adalah sebesar 1,49 persen dari total penerimaan pajak daerah pada tahun 2004 sampai dengan 2008.

D. Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar potensi yang dimiliki oleh hotel dan restoran. Yang dimaksud dengan potensi hotel dan potensi restoran adalah segala kemampuan dan kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dalam keadaan 100 %.

1. Analisis Potensi Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap / istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Dalam menghitung potensi pajak hotel, peneliti berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel dan rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

Rumus Potensi Pajak Hotel (Mardiasmo, Makfatih, 2000) :

$$\text{Potensi Pajak Hotel} = \text{Jumlah Kamar} \times \text{Tingkat Hunian} \times \text{Tarif Kamar} \times \\ \text{Jumlah Hari} \times \text{Jumlah Bulan} \times 10 \%$$

Keterangan :

- Jumlah kamar = Diperoleh dari Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar.
- Tingkat Hunian = Secara umum tingkat hunian dibagi menjadi tiga bagian yaitu ramai, sedang dan sepi.
 - Ramai = Tingkat Hunian ramai memiliki persentase sebesar 80 persen. Secara umum terjadi selama 5 bulan.
 - Sedang = Tingkat Hunian sedang memiliki persentase sebesar 40 persen. Secara umum terjadi selama 4 bulan.
 - Sepi = Tingkat Hunian sepi memiliki persentase sebesar 20 persen. Secara umum terjadi selama 3 bulan

Oleh sebab itu diambil rata-ratanya menjadi 46 %.
- Tarif kamar = Rata-rata tarif kamar pada hotel diperoleh dari Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar.
- Jumlah Hari = 16 hari merupakan asumsi bahwa dalam sebulan hotel dihuni selama 16 hari.
- Jumlah Bulan = 9 bulan diasumsikan hotel dihuni pada tingkat hunian ramai dan sedang sehingga pada saat tingkat hunian sepi pajak hotel tidak dipungut.
- 10 % adalah tarif pajak hotel.

Berdasarkan data yang telah diolah, diperoleh potensi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2008 adalah sebesar Rp. 1.770.475.968,-.

2. Analisis Potensi Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau *catering*. Dalam menghitung potensi pajak restoran, peneliti berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran dan rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

Rumus Potensi Pajak Restoran (Mardiasmo, Makfatih, 2000) :

Potensi Pajak Restoran = Jumlah Kursi x Tingkat Kunjungan x Tarif Rata-rata x Jumlah Hari x Jumlah Bulan x 10 %

Keterangan :

- Jumlah kursi diperoleh dari Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar.
- Tingkat kunjungan restoran / rumah makan berkisar antara 50%-70%, sehingga untuk menyederhanakan dibagi menjadi tiga bagian yaitu tingkat hunian optimis (70 %), biasa (60 %), dan pesimis (50 %).

Sehingga diambil rata-rata tingkat kunjungan sebesar 60 %.

- Rata-rata pengeluaran tamu yaitu rata-rata uang yang dikeluarkan tamu untuk sekali makan minum per orang sekali makan. Data tersebut diperoleh dari Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar.
- 30 hari merupakan asumsi bahwa restoran / rumah makan buka setiap hari selama satu tahun.
- 12 bulan untuk menghitung potensi pajak restoran selama satu tahun.
- 10 % adalah tarif pajak restoran.

Berdasarkan data yang telah diolah, diperoleh potensi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2008 adalah sebesar Rp. 457.088.400,-.

E. Analisis Efektifitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Salah satu tolak ukur pajak hotel dan pajak restoran adalah efektifitas (hasil guna). Efektifitas adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dengan potensi yang akan dicapai. Semakin besar penerimaan pajak hotel dan pajak restoran yang dapat terealisasi dibanding potensi, maka semakin efektif.

1. Efektifitas Pajak Hotel

Analisis ini digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungut pajak hotel terhadap potensi penerimaan pajak hotel. Rumus efektifitas pajak hotel adalah :

$$\text{Efektifitas Pajak hotel} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Potensi Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100 \%$$

Berikut ini adalah efektifitas pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2008 sebagai tahun sampel.

Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2008 = Rp. 575.420.710,-

Potensi penerimaan pajak hotel tahun 2008 = Rp 1.770.475.968,-

$$\begin{aligned} \text{Efektifitas Pajak hotel} &= \frac{\text{Rp. 575.420.710,-}}{\text{Rp 1.770.475.968,-}} \times 100 \% \\ &= 32,50 \% \end{aligned}$$

Pengamatan terhadap efektifitas pemungutan pajak hotel di Karanganyar pada tahun 2008 menunjukkan bahwa efektifitas pemungutan pajak tidak efektif. Hal ini dapat dilihat dari nilai efektifitas yang cukup rendah yaitu 32,50 persen yang artinya pajak hotel baru dapat terealisasikan sebesar 32,50 persen oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar.

2. Efektifitas Pajak Restoran

Analisis ini digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungut pajak restoran terhadap potensi penerimaan pajak restoran. Rumus efektifitas pajak restoran adalah :

$$\text{Efektifitas Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Potensi Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100 \%$$

Berikut ini adalah efektifitas pemungutan pajak restoran di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2008 sebagai tahun sampel.

Realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2008 = Rp. 367.613.892,-

Potensi penerimaan pajak restoran tahun 2008 = Rp 457.088.400,-

$$\begin{aligned} \text{Efektifitas Pajak Restoran} &= \frac{\text{Rp. 367.613.892,-}}{\text{Rp 457.088.400,-}} \times 100 \% \\ &= 80,43 \% \end{aligned}$$

Pengamatan terhadap efektifitas pemungutan pajak restoran di Karanganyar pada tahun 2008 menunjukkan bahwa efektifitas pemungutan pajak cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari nilai efektifitas yang cukup tinggi yaitu 80,43 persen yang artinya pajak restoran baru dapat terealisasi sebesar 80,43 persen oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar.

F. Analisis Efisiensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Analisis efisiensi pajak hotel dan pajak restoran digunakan untuk menunjukkan perbandingan antara biaya pemungutan pajak hotel dan pajak restoran dengan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran, dimana

jika hasil perhitungan efisiensi mendekati satu atau yang kecil maka pemungutan pajak hotel dan pajak restoran dinyatakan efisien.

1. Analisis Efisiensi Pajak Hotel

Analisis efisiensi pajak hotel menunjukkan perbandingan antara biaya pemungutan pajak hotel dengan realisasi penerimaan pajak hotel, dimana jika hasil perhitungan efisiensi mendekati satu maka pemungutan pajak hotel dinyatakan sudah efisien. Untuk menghitung tingkat efisiensi pajak hotel digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi Pajak Hotel} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100 \%$$

Efisiensi akan lebih besar bila biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan pajak hotel ditekan serendah mungkin. Biaya pemungutan adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar khusus dalam pengelolaan pajak hotel. Berikut ini perhitungan biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan pajak hotel (Mardiasmo, 2000) :

$$\text{Biaya Pengutan Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi PAD}} \times \text{Belanja Rutin Dipenda}$$

Berikut dapat dilihat tabel 4.11 efisiensi pemungutan pajak hotel

Tabel 4.11 Efisiensi Pemungutan Pajak Hotel Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2004-2008

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Hotel	PAD	Belanja Rutin Dipenda	Biaya Pemungutan	Efisiensi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
2004	261.472.173	29.485.262.726	5.320.389.934	47.180.651	18,04
2005	325.695.699	34.302.565.951	4.350.518.144	41.307.261	12,68
2006	377.673.020	46.052.120.123	5.671.317.430	46.510.422	12,31
2007	440.428.766	56.889.064.224	7.095.732.388	54.934.365	12,47
2008	575.420.710	64.470.676.168	7.590.632.430	67.748.740	11,77
Rata-Rata	396.138.074	46.239.937.838	6.005.718.065	51.536.287	13,45

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Karanganyar, diolah.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi pemungutan pajak hotel cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2004, efisiensi pemungutan pajak hotel adalah 18,04 persen. Pada tahun 2005, efisiensi pemungutan pajak hotel mengalami penurunan menjadi 12,68 persen. Pada tahun 2006, efisiensi pemungutan pajak hotel masih mengalami penurunan menjadi sebesar 12,31 persen. Pada tahun 2007, efisiensi pemungutan pajak hotel mengalami kenaikan menjadi 12,47 persen. Pada tahun 2008, efisiensi pemungutan pajak hotel kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 11,77 persen.

Bila dilihat dari rata-rata selama lima tahun terakhir maka diperoleh efisiensi pemungutan pajak hotel sebesar 13,45 persen dan berdasarkan kinerja keuangan Kepmendagri nomor 690.900.327 tahun 1996, maka efisiensi pemungutan pajak hotel sebesar 13,45 persen dikatakan sangat efisien.

2. Analisis Efisiensi Pajak Restoran

Analisis efisiensi pajak restoran menunjukkan perbandingan antara biaya pemungutan pajak restoran dengan realisasi penerimaan pajak restoran, dimana jika hasil perhitungan efisiensi mendekati satu maka pemungutan pajak restoran dinyatakan sudah efisien. Untuk menghitung tingkat efisiensi pajak restoran digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi Pajak Restoran} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100 \%$$

Efisiensi akan lebih besar bila biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan pajak hotel ditekan serendah mungkin. Biaya pemungutan adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar khusus dalam pengelolaan pajak hotel. Berikut ini perhitungan biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan pajak hotel (Mardiasmo, 2000) :

$$\text{Biaya Pengutan Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi PAD}} \times \text{Belanja Rutin Dipenda}$$

Berikut dapat dilihat tabel 4.12 efisiensi pemungutan pajak restoran

Tabel 4.12 Efisiensi Pemungutan Pajak Restoran Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2004-2008

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Restoran	PAD	Belanja Rutin Dipenda	Biaya Pemungutan	Efisiensi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
2004	156.684.543	29.485.262.726	5.320.389.934	28.272.526	18,04
2005	201.345.473	34.302.565.951	4.350.518.144	25.536.198	12,68
2006	227.795.587	46.052.120.123	5.671.317.430	28.053.020	12,31
2007	254.303.867	56.889.064.224	7.095.732.388	31.719.139	12,47
2008	367.613.892	64.470.676.168	7.590.632.430	43.282.032	11,77
Rata-Rata	241.548.672	46.239.937.838	6.005.718.065	31.372.583	13,45

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Karanganyar, diolah.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi pemungutan pajak hotel cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2004, efisiensi pemungutan pajak hotel adalah 18,04 persen. Pada tahun 2005, efisiensi pemungutan pajak hotel mengalami penurunan menjadi 12,68 persen. Pada tahun 2006, efisiensi pemungutan pajak hotel masih mengalami penurunan menjadi sebesar 12,31 persen. Pada tahun 2007, efisiensi pemungutan pajak hotel mengalami kenaikan menjadi 12,47 persen. Pada tahun 2008, efisiensi pemungutan pajak restoran kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 11,77 persen.

Bila dilihat dari rata-rata selama lima tahun terakhir maka diperoleh efisiensi pemungutan pajak hotel sebesar 13,45 persen dan berdasarkan kinerja keuangan Kepmendagri nomor 690.900.327 tahun 1996, maka efisiensi pemungutan pajak hotel sebesar 13,45 persen dikatakan sangat efisien.

G. Analisis Elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Analisis Elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pajak Hotel dan Pajak Restoran digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepekaan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika terjadi perubahan pada penerimaan pajak hotel dan pajak restoran. Dalam perhitungan menggunakan elastisitas tersebut akan diperoleh tiga kemungkinan hasil perhitungan, yaitu :

- Elastis ($E > 1$), artinya apabila pajak hotel dan pajak restoran (variabel independen) mengalami perubahan sebesar satu persen maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) (variabel dependen) akan mengalami kenaikan perubahan lebih dari satu persen.
- Elastis ($E < 1$), artinya apabila pajak hotel dan pajak restoran (variabel independen) mengalami perubahan sebesar satu persen maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) (variabel dependen) akan mengalami kenaikan perubahan kurang dari satu persen.
- Elastis ($E = 1$), artinya apabila pajak hotel dan pajak restoran (variabel independen) mengalami perubahan sebesar satu persen maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) (variabel dependen) akan mengalami perubahan sebesar satu persen atau besarnya perubahan variabel independen (kenaikan / penurunan) sama dengan perubahan variabel dependen.

1. Analisis Elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pajak Hotel

Analisis elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pajak hotel digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepekaan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika terjadi perubahan pada penerimaan pajak hotel. Berdasarkan analisis ini kita akan dapat mengetahui bagaimana sensitifitas dari pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan pajak hotel.

Perhitungan elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pajak hotel dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.13 Elastisitas PAD terhadap Pajak Hotel di Kabupaten Karanganyar Tahun 2004-2008

Tahun Anggaran	PAD	Pertumbuhan PAD	Pajak Hotel	Pertumbuhan Pajak Hotel	Elastisitas
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)
2004	29.485.262.726		261.472.173		
		16,34		24,56	0,67
2005	34.302.565.951		325.695.699		
		34,25		15,96	2,15
2006	46.052.120.123		377.673.020		
		23,53		16,62	1,42
2007	56.889.064.224		440.428.766		
		13,33		30,65	0,43
2008	64.470.676.168		575.420.710		
Rata-Rata	46.239.937.838	21,86	396.138.074	21,95	1,17

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Karanganyar, diolah.

Tabel 4.13 di atas menunjukkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pajak hotel selama lima tahun. Pada tahun 2005

pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 16,34 persen dan pajak hotel sebesar 24,56 persen. Pada tahun 2006 pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 34,25 persen dan pajak hotel sebesar 15,96 persen. Pada tahun 2007 pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 23,53 persen dan pajak hotel sebesar 16,62 persen. Pada tahun 2008 pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 13,33 persen dan pajak hotel sebesar 30,65 persen.

Nilai elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pajak hotel setiap tahunnya cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2005, elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pajak hotel adalah sebesar 0,67 persen dan artinya apabila pajak hotel berubah sebesar satu persen maka akan menaikkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,67 persen (inelastis) jika faktor lain dianggap tetap. Pada tahun 2006, elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pajak hotel adalah sebesar 2,15 persen dan artinya apabila pajak hotel berubah sebesar satu persen maka akan menaikkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 2,15 persen (elastis) jika faktor lain dianggap tetap. Pada tahun 2007, elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pajak hotel adalah sebesar 1,42 persen dan artinya apabila pajak hotel berubah sebesar satu persen maka akan menaikkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,42 persen (elastis) jika faktor lain dianggap tetap. Pada tahun 2008, elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pajak hotel adalah sebesar 0,43 persen dan artinya apabila pajak hotel berubah sebesar

satu persen maka akan menaikkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,43 persen (inelastis) jika faktor lain dianggap tetap. Rata-rata elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pajak hotel selama lima tahun adalah sebesar 1,17 persen (elastis).

2. Analisis Elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pajak Restoran

Analisis elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pajak restoran digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepekaan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika terjadi perubahan pada penerimaan pajak restoran. Berdasarkan analisis ini kita akan dapat mengetahui bagaimana sensitifitas dari pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan pajak restoran.

Perhitungan elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pajak restoran dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 4.14 Elastisitas PAD terhadap Pajak Restoran di Kabupaten Karanganyar Tahun 2004-2008

Tahun Anggaran	PAD	Pertumbuhan PAD	Pajak Restoran	Pertumbuhan Pajak Restoran	Elastisitas
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)
2004	29.485.262.726		156.684.543		
		16,34		28,50	0,57
2005	34.302.565.951		201.345.473		
		34,25		13,14	2,61
2006	46.052.120.123		227.795.587		
		23,53		11,64	2,02
2007	56.889.064.224		254.303.867		
		13,33		44,56	0,3
2008	64.470.676.168		367.613.892		
Rata-Rata	46.239.937.838	21,86	241.548.672	24,46	1,38

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Karanganyar, diolah.

Tabel 4.14 di atas menunjukkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pajak restoran selama lima tahun. Pada tahun 2005 pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 16,34 persen dan pajak restoran sebesar 28,50 persen. Pada tahun 2006 pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 34,25 persen dan pajak restoran sebesar 13,14 persen. Pada tahun 2007 pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 23,53 persen dan pajak restoran sebesar 11,64 persen. Pada tahun 2008 pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 13,33 persen dan pajak restoran sebesar 44,56 persen.

Nilai elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pajak restoran setiap tahunnya cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2005, elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pajak restoran adalah

sebesar 0,57 persen dan artinya apabila pajak restoran berubah sebesar satu persen maka akan menaikkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,57 persen (inelastis) jika faktor lain dianggap tetap. Pada tahun 2006, elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pajak restoran adalah sebesar 2,61 persen dan artinya apabila pajak restoran berubah sebesar satu persen maka akan menaikkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 2,61 persen (elastis) jika faktor lain dianggap tetap. Pada tahun 2007, elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pajak restoran adalah sebesar 2,02 persen dan artinya apabila pajak restoran berubah sebesar satu persen maka akan menaikkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 2,02 persen (elastis) jika faktor lain dianggap tetap. Pada tahun 2008, elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pajak restoran adalah sebesar 0,3 persen dan artinya apabila pajak restoran berubah sebesar satu persen maka akan menaikkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,3 persen (inelastis) jika faktor lain dianggap tetap. Rata-rata elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pajak restoran selama lima tahun adalah sebesar 1,38 persen (elastis).

H. Intepretasi Ekonomi

Reformasi yang dimulai beberapa tahun lalu di negara kita telah merambah ke hampir seluruh aspek kehidupan. Salah satu aspek reformasi yang dominan adalah aspek pemerintahan. Aspek pemerintahan yang dimaksudkan adalah aspek hubungan pemerintah pusat dan daerah. Pada aspek ini isu yang mencuat adalah adanya tuntutan ekonomi yang lebih luas dan nyata yang harus diberikan kepada daerah (pemerintah daerah), khususnya pada pemerintah daerah tingkat II / pemerintah kabupaten / kota.

Tuntutan atas ekonomi daerah membawa kepada berbagai interpretasi dari masyarakat. Interpretasi yang dilakukan bahkan menimbulkan kesan berlebihan dari banyak pihak. Otonomi oleh sebagian pihak diinterpretasikan sebagai suatu kebebasan daerah untuk berbuat segala sesuatu sehingga mengakibatkan timbulnya gejala disintegrasi bangsa. Oleh sebab itu, banyak pihak kemudian mengingatkan agar otonomi daerah yang sedang menjadi isu sentral ini tidak sampai membawa kepada disintegrasi bangsa. Otonomi daerah harus selalu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kemampuan suatu daerah dalam menjalankan otonomi daerah tentunya berbeda-beda antara suatu daerah dengan daerah lain. Banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut dimana salah satu diantaranya adalah faktor sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Suatu daerah yang memiliki banyak sumber daya

ekonomi pasti pendapatan yang diterima dari sektor pajak daerah juga tinggi jika dibandingkan dengan daerah yang memiliki sumber daya ekonomi yang sedikit. Besar kecilnya pendapatan daerah yang diterima sangat mempengaruhi daerah dalam melakukan pembiayaan untuk pelayanan publik.

Sebagai contohnya, kita dapat membandingkan kondisi ekonomi beberapa daerah berdasarkan penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Payakumbuh dan Kabupaten Kendari. Berdasarkan hasil penelitian dapat dibandingkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.14 Perbandingan Kondisi Ekonomi Empat Daerah

No.	Kriteria	Kabupaten / Kota			
		Karanganyar	Sukoharjo	Kendari	Payakumbuh
1	Pemungutan Pajak Daerah	efektif dan efisien	-	-	-
2	Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD	fluktuasi	menurun	menurun	-
3	Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah	meningkat	-	fluktuasi	meningkat
4	Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran	Pajak Hotel (belum efektif); Pajak Restoran (efektif)	kurang efektif	tidak efektif dan tidak efisien	-

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa keadaan ekonomi di suatu daerah berbeda-beda dalam menjalankan otonomi daerah. Perbedaan sumber daya ekonomi merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhinya dan hal ini menjadi tugas dari pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah semaksimal mungkin dengan sumber daya ekonomi yang dimiliki serta perlu adanya dukungan dari seluruh lapisan masyarakat agar pembnagunan daerah dapat berjalan dengan baik.



BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini akan disajikan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Dari kesimpulan yang ada, penulis berusaha memberikan saran sehubungan dengan permasalahan yang telah dikemukakan, sehingga hal ini dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan.

A. Kesimpulan

Dari uraian dan penjelasan yang telah dianalisis pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 mengalami fluktuasi dengan kontribusi rata-rata sebesar 0,86 persen dan laju pertumbuhan rata-rata pajak hotel sebesar 20,31 persen. Sedangkan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 mengalami fluktuasi dengan kontribusi rata-rata sebesar 0,53 persen dan laju pertumbuhan rata-rata pajak restoran sebesar 22,27 persen.
2. Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 cenderung mengalami kenaikan dengan kontribusi rata-rata sebesar 2,45 persen. Sedangkan kontribusi pajak restoran

terhadap pajak daerah selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 cenderung mengalami kenaikan dengan kontribusi rata-rata sebesar 1,49 persen.

3. Pada tahun 2008, realisasi penerimaan pajak hotel (Rp. 575.420.710,-) relatif lebih besar dari target (Rp. 486.027.000,-) dan jauh lebih kecil dari potensi yang sebenarnya (Rp. 1.770.475.968,-). Sedangkan realisasi penerimaan pajak restoran (Rp. 367.613.892,-) relatif lebih besar dari target (Rp. 291.384.000,-) dan relatif lebih kecil dari potensi yang sebenarnya (Rp. 457.088.400,-).
4. Tingkat efektifitas pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2008 adalah sebesar 32,50 persen. Berdasarkan Kepmendragi Nomor 690.900.327 bahwa hasil perhitungan efektifitas di bawah 60 persen dinyatakan tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karanganyar belum efektif. Sedangkan tingkat efektifitas pemungutan pajak restoran di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2008 adalah sebesar 80,43 persen. Berdasarkan Kepmendragi Nomor 690.900.327 bahwa hasil perhitungan efektifitas di atas 60 persen dinyatakan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak restoran di Kabupaten Karanganyar telah dilaksanakan secara efektif
5. Tingkat efisiensi pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 cenderung mengalami penurunan dengan tingkat efisiensi rata-rata sebesar 13,45 persen. Berdasarkan Kepmendragi Nomor 690.900.327 bahwa hasil

perhitungan efisiensi di bawah 60 persen dinyatakan sangat efisien, maka efisiensi pemungutan pajak hotel dan pajak restoran dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 dinyatakan sangat efisien.

6. Elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pajak hotel selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 mengalami fluktuasi dengan elastisitas rata-rata sebesar 1,17 persen (elastis). Sedangkan elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pajak restoran selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 juga mengalami fluktuasi dengan elastisitas rata-rata sebesar 1,38 persen (elastis). Hal tersebut menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran dapat digunakan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar meskipun pengaruhnya tidak terlalu besar.

B. Saran

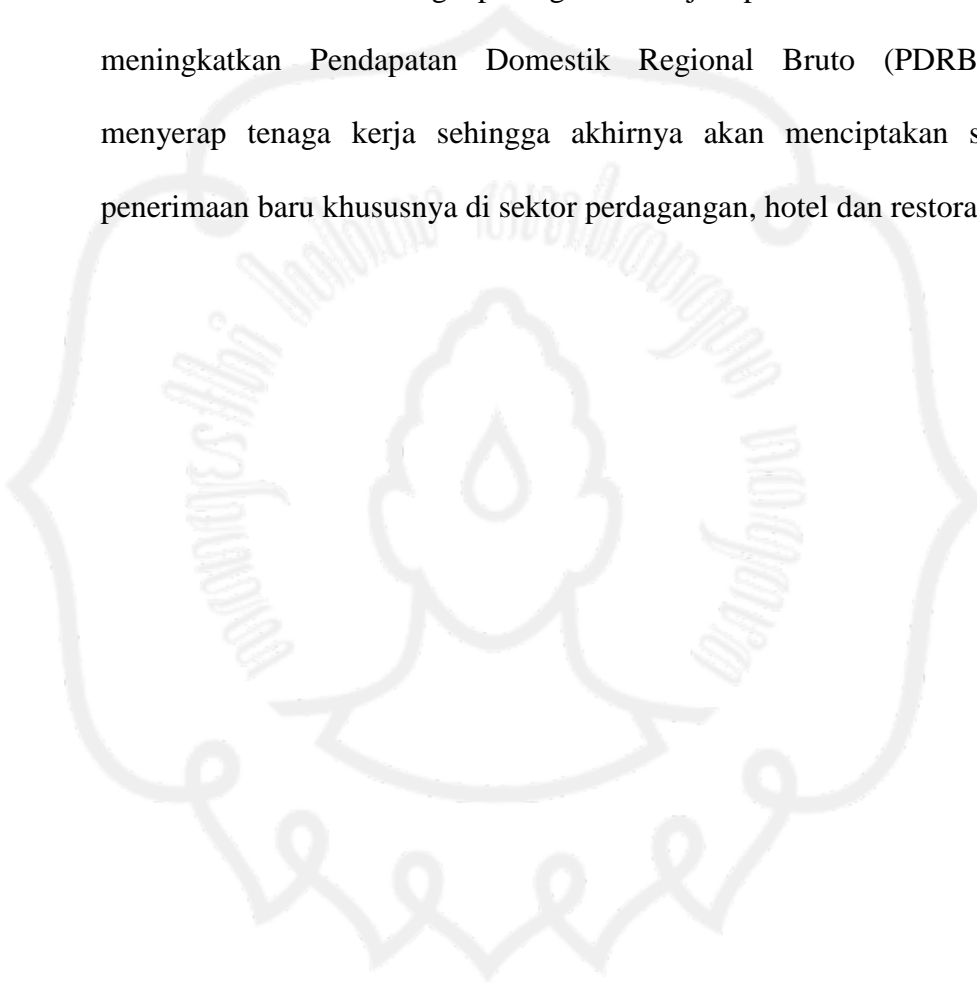
Berdasarkan analisis dan kesimpulan di atas, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui potensi pajak hotel dan restoran, maka pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar, khususnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Dinas Pariwisata perlu melakukan pendataan ulang (peremajaan data) terhadap wajib pajak dan obyek pajak dari pajak hotel dan restoran.
2. Untuk meningkatkan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pajak daerah, maka perlu dilakukan

intensifikasi pajak hotel dan pajak restoran agar kontribusinya dapat dirasakan lebih besar terhadap total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pajak daerah. Upaya intensifikasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sosialisasi Perda No. 20 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel dan Perda No. 21 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran.
 - b. Meningkatkan kinerja dan kualitas sumber daya aparat yang berkaitan dengan pajak hotel dan pajak restoran melalui pendidikan dan pelatihan.
 - c. Memberi sanksi yang tegas terhadap para wajib pajak yang melanggar pembayaran pajak sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang penagihan dengan surat paksa.
3. Dalam menetapkan target pajak hotel dan pajak restoran, hendaknya pemerintah daerah berpatokan pada penghitungan potensi pajak hotel dan pajak restoran sehingga penerimaan pajak hotel dan pajak restoran sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh hotel dan restoran.
 4. Untuk meningkatkan efektifitas pajak hotel dan pajak restoran, maka hendaknya dilakukan penghitungan potensi pajak hotel. Penghitungan potensi pajak hotel dan potensi pajak restoran digunakan sebagai pertimbangan dalam menetapkan target sehingga dapat ditingkatkan.
 5. Untuk meningkatkan elastisitas pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka perlu dijalin kerja sama dengan instansi lain misalnya Dinas Pariwisata dan Dinas Perindustrian untuk

menarik wisatawan sehingga semakin banyak pengunjung yang datang, makan dan menginap di Kabupaten Karanganyar. Selain itu perlu menciptakan suasana / iklim yang mendorong penanaman modal swasta, misalnya dengan mempermudah birokrasi dan perijinan. Peningkatan modal akan mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan menyerap tenaga kerja sehingga akhirnya akan menciptakan sumber penerimaan baru khususnya di sektor perdagangan, hotel dan restoran.



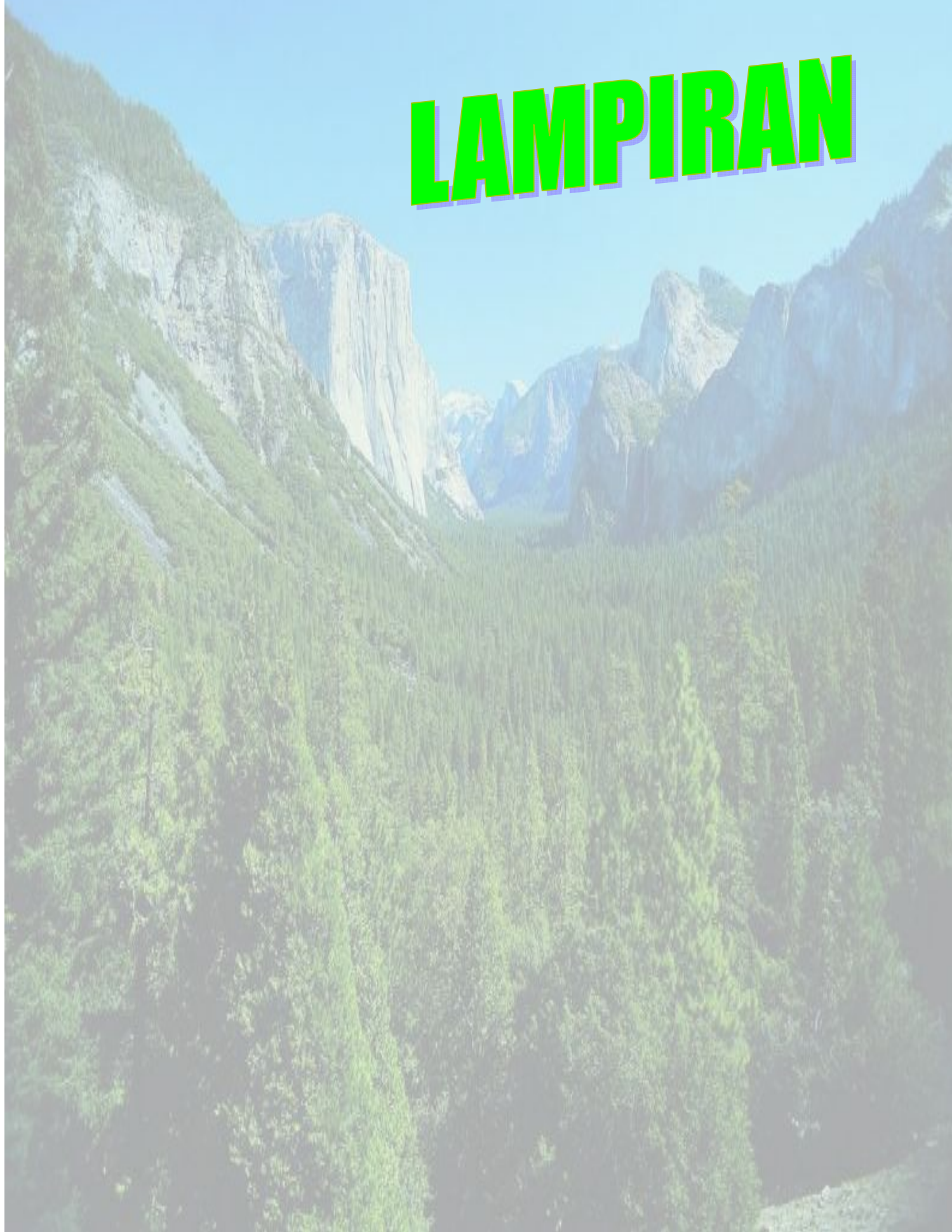
DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Badan Pusat Statistik. *Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2004-2008*. Karanganyar: BPS Karanganyar.
- Daud, Syafri. 2004. Efisiensi dan Efektifitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Peningkatan PAD di Kabupaten Kendari. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi.
- Devas, Nick, dkk. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UIP.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. 2009. *Direktorat Usaha Rumah Makan Kabupaten Karanganyar*.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. 2009. *Statistik Pariwisata Kabupaten Karanganyar Tahun 2008*.
- Hakim, Arif Rahman. 2005. Evaluasi Kemandirian Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Wilayah SUBOSUKA WONOSRATEN Propinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika*. Vol. 1, No. 1, hal. 35-43, Mei 2005.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Handayani, Ponco Cahyawati. 2001. *Aspek Ekonomi Pemungutan Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sendiri di Kabupaten Karanganyar*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Hariyanto, Hudi. 2005. Penyusunan dan Penghitungan Indeks Pembangunan Daerah sebagai Tolak Ukur Kemajuan Daerah Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika*. Vol. 1, No. 1, hal. 15-23, Mei 2005.
- Mahmudi. 2006. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo, Makhfatih. 2000. *Penghitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang* (Laporan Penelitian). PAU UGM-Pemda Kabupaten Magelang.

- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mujiwardhani, Alfian. 2008. Analisis Kemandirian Daerah Kabupaten Cilacap Sebelum dan Selama Otonomi Daerah. *Jurnal Dinamika*. Vol. 3, No. 2, hal. 50-60, Desember 2008.
- Mulyanto. 2007. *Aspek dan Dimensi Keuangan Daerah di Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal*. Modul Mata Kuliah Analisis Keuangan Daerah. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Munir, Badrul. 2003. *Perencanaan Anggaran Kerja : Memangkas Inefisiensi Anggaran Daerah*. Mataram: Samawa Center.
- Pandiangan, Liberty. 2002. Pajak Pusat dan Pajak Daerah dalam Kerangka Sistem Perpajakan Nasional. *Jurnal Perpajakan Indonesia*. Vol. 1, No. 7, hal. 10-13.
- Pandiangan, Liberty. 2002. Urgensi Pemotongan dan Pemungutan Pajak dalam Sistem Perpajakan Nasional. *Jurnal Perpajakan Indonesia*. Vol. 2 No. 2, hal. 24-29.
- _____, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 21 tahun 2001 tentang *Pajak Hotel*.
- _____, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 22 tahun 2001 tentang *Pajak Restoran*.
- PHRI. 2008. *Persatuan Hotel Republik Indonesia*. Karanganyar.
- Pramudiasuti, Mei Rina. 2007. *Analisis Kinerja dan Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Sukoharjo*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Republik Indonesia. 1999. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang *Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1999. Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2000. Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah* (revisi). Jakarta.

- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang ***Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*** (revisi). Jakarta.
- Siswanto, Adrianus Dwi. 2008. Analisis Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Derajat Otonomi Pemerintah Propinsi di Seluruh Indonesia. ***Kajian Ekonomi dan Keuangan***. Vol. 12, No. 1, hal. 83-108, Maret 2008..
- Soedarsono. 1986. ***Pengantar Ekonomi Mikro***. Edisi IV. Jakarta: LP3ES.
- Suhedi, Ramdan. 2000. ***Manajemen Keuangan Daerah***. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Sukmana, Raditya. 2003. Analisis Perbedaan *Tax Effort* pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun 1999. ***Jurnal Skema***. Vol. 1, No. 3, hal. 27-33, Mei 2003.
- Sumardi. 2005. Analisis Potensi dan Realisasi Pajak Parkir Non Badan Jalan Kota Surakarta 2004. ***Jurnal Dinamika***. Vol. 1, No. 1, hal. 55-59, Mei 2005.
- Suparmoko. 1992. ***Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek***. Edisi IV. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Widowati, Endang. 1998. Peranan Tabungan Masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah Sendiri terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto di Jawa Tengah. ***Perspektif***. No. 10, hal. 41-46, Edisi April - Juni 1998.
- Zurniwati. 2001. Peranan Pengendalian terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Menunjang Pembangunan Kota Payakumbuh. ***Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah***. Edisi Pertama.
- www.karanganyar.go.id. Kondisi Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008. (diakses tanggal 17 Oktober 2009).

LAMPIRAN



Daftar Hotel di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008

NO	NAMA HOTEL	KLASIFIKASI	JUMLAH KAMAR	ALAMAT	TARIF RATA-RATA KAMAR (Rp)
A	HOTEL BINTANG				
1	Lor In	B.5	114	Jln. Adi Sucipto No. 47, Colomadu	1.550.000
2	Pondok Sari II	B.2	40	Timur Balekambang Tawangmangu	200.000
3	Komojoyo Komoratih	B.1	40	Jln. Raya Lawu, Tawangmangu	201.000
4	Narita	B.1	31	Jln. Adi Sucipto, Colomadu	201.000
B	HOTEL MELATI				
1	Pondok Sari I	M.3	26	Utara Balekambang, Tawangmangu	143.000
2	Lawu	M.3	16	Kalisoro, Tawangmangu	111.000
3	Garuda	M.2	20	Jln. Raya Lawu, Tawangmangu	143.000
4	Hotel Maliyawan	M.2	21	Jln. Raya Lawu, Tawangmangu	117.000
5	Fajar Indah	M.2	10	Jln. Raya Lawu, Tawangmangu	117.000
6	Duta	M.2	11	Kalisoro, Tawangmangu	117.000
7	Asri	M.2	24	Kalisoro RT 6, Tawangmangu	143.000
8	Pondok Indah	M.2	32	Kalisoro, Tawangmangu	118.000
9	Wahyu Sari A	M.2	20	Beji, Tawangmangu	60.000
10	Wahyu Sari B	M.2	20	Beji, Tawangmangu	60.000
11	Hotel Pringgodani	M.2	14	Banjarsari, Tawangmangu	102.000
12	Marini I	M.2	20	Colomadu, Karanganyar	60.000
13	4848	M.2	36	Dagen, Jaten	60.000
14	Pondok Asia	M.2	14	Beji, Tawangmangu	53.000
15	Hotel Sido Langgeng	M.2	13	Banjarsari, Tawangmangu	83.000
16	Hotel Tejomoyo	M.2	18	Kalisoro, Tawangmangu	53.000
17	Balai Istirahat Pekerja	M.2	12	Beji, Tawangmangu	60.000
18	Muncul Sari	M.2	16	Jln. Adi Sucipto, Colomadu	60.000
19	Bukit Surya	M.2	9	Tarukan 3/5 Plumbon Tawangmangu	60.000
20	Jonggrang I	M.2	12	Jln. Adi Sucipto, Colomadu	60.000
21	Asri	M.2	24	Kalisoro, Tawangmangu	60.000
22	Marini II	M.1	9	Colomadu, Karanganyar	60.000
23	Jonggrang II	M.1	14	Bolon, Colomadu	60.000
24	Anugerah Indah	M.1	5	Beji, Tawangmangu	60.000
25	Bangun Trisno	M.1	8	Kalisoro, Tawangmangu	60.000

26	Kusumo Joglo	M.1	18	Jln. Raya Palur, Jaten	60.000
27	Tritunggal	M.1	8	Beji, Tawangmangu	60.000
28	Wisma Yanti	M.1	5	Jln. Raya Lawu, Tawangmangu	60.000
29	Giri Mulyo	M.1	10	Beji, Tawangmangu	60.000
30	Sari Handayani	M.1	11	Jln. Raya Lawu, Tawangmangu	60.000
31	Mandaulin	M.1	12	Kalisoro, Tawangmangu	60.000
32	Hotel Sri Dewi	M.1	6	Beji, Tawangmangu	60.000
33	Hotel Sri Rejeki	M.1	7	Jetis 2/1 Tawangmangu	60.000
34	Hotel Tentrem	M.1	7	Beji, Tawangmangu	60.000
35	Hotel Santosa Mulyo I	M.1	7	Beji, Tawangmangu	60.000
36	Hotel Santosa Mulyo II	M.1	10	Beji, Tawangmangu	60.000
37	Widodo Mulyo	M.1	7	Beji, Tawangmangu	60.000
38	Mekar Indah	M.1	16	Beji, Tawangmangu	60.000
39	Hotel Lumayan	M.1	9	Beji, Tawangmangu	60.000
40	Hotel Rahayu	M.1	7	Jetis 2/1 Tawangmangu	60.000
41	Hotel Adem Ayam	M.1	5	Jln. Pringgodani, Tawangmangu	60.000
42	Hotel Madu Laras	M.1	6	Kalisoro, Tawangmangu	60.000
43	Tirta Sari	M.1	90	Jln. Raya Solo Kra Km 6,7	60.000
44	Ken Dedes	M.1	22	Nglano RT 06/II Tasikmadu	60.000
45	Sariasih	M.1	11	Gedangan RT 01/03 Karangpandan	60.000
46	Puncak	M.1	8	Jln. Raya Karangpandan	60.000
47	Pringgosari	M.1	14	Beji, Tawangmangu	60.000
48	Srikandi	M.1	18	Bolon, Colomadu	60.000
C	PONDOK WISATA				
1	Kampungku	PW	3	Somokado, Lebak Tawangmangu	37.000
2	Anita	PW	4	Beji, Tawangmangu	37.000
3	Harjuno	PW	4	Kalisoro, Tawangmangu	37.000
4	Srimulyo	PW	5	Banjarsari, Tawangmangu	37.000
5	Ary	PW	3	Beji, Tawangmangu	37.000
6	Dhani	PW	5	Beji, Tawangmangu	37.000
7	Sumber Rejeki	PW	3	Beji, Tawangmangu	37.000
8	Prasojo	PW	5	Beji, Tawangmangu	37.000
9	Wulan sari	PW	5	Beji, Tawangmangu	37.000
10	Barokah	PW	3	Beji, Tawangmangu	37.000
11	Adem Ayam	PW	3	Beji, Tawangmangu	37.000
12	Cempoko Mulyo	PW	5	Beji, Tawangmangu	37.000
13	Wijaya Kusuma I	PW	4	Beji, Tawangmangu	37.000
14	Wijaya Kusuma II	PW	3	Beji, Tawangmangu	37.000
15	Artho Moro	PW	5	Beji, Tawangmangu	37.000
16	Sido Mulyo	PW	5	Beji, Tawangmangu	37.000
17	Argo Joyo	PW	5	Beji, Tawangmangu	37.000

18	Sederhana	PW	5	Beji, Tawangmangu	37.000
19	Citra Mandiri	PW	4	Beji, Tawangmangu	37.000
20	Anil Lestari	PW	5	Beji, Tawangmangu	37.000
21	Dwi Lestari	PW	5	Beji, Tawangmangu	37.000
22	Rahayu	PW	4	Beji, Tawangmangu	37.000
23	Sederhana	PW	5	Karangkulon, Tawangmangu	37.000
24	Mihara	PW	3	Beji, Tawangmangu	37.000
25	Wahyuni	PW	4	Beji, Tawangmangu	37.000
26	Tri Tunggal	PW	5	Beji, Tawangmangu	37.000
27	Ariska	PW	4	Beji, Tawangmangu	37.000
28	Losmen Lestari	PW	5	Beji, Tawangmangu	37.000
29	Kartika Sari	PW	4	Beji, Tawangmangu	37.000
30	Wukir Sari	PW	3	Beji, Tawangmangu	37.000
31	Anda	PW	3	Beji, Tawangmangu	37.000
32	Piji Kembar	PW	5	Beji, Tawangmangu	37.000
33	Lumayan	PW	5	Beji, Tawangmangu	37.000
34	Villatini	PW	3	Kalisoro, Tawangmangu	37.000
35	Tentrem	PW	5	Kalisoro, Tawangmangu	37.000
36	Sartika	PW	3	Kalisoro, Tawangmangu	37.000
37	Widyamulya	PW	3	Banjarsari, Tawangmangu	37.000
38	Amarta	PW	5	Banjarsari, Tawangmangu	37.000
39	Sukuh Permai	PW	4	Girimulyo, Ngargoyoso	37.000
40	Widodo Mulyo	PW	4	Beji, Tawangmangu	37.000
41	Sumber Wening	PW	3	Beji, Tawangmangu	37.000
42	Oshin	PW	3	Beji, Tawangmangu	37.000
43	Rama Shinta	PW	3	Beji, Tawangmangu	37.000
44	Desi	PW	5	Beji, Tawangmangu	37.000
45	Tirta Amarta	PW	3	Beji, Tawangmangu	37.000
46	Devi	PW	4	Beji, Tawangmangu	37.000
47	Untung	PW	4	Beji, Tawangmangu	37.000
48	Sandria	PW	5	Kalisoro, Tawangmangu	37.000
49	Tanjung	PW	4	Banjarsari, Tawangmangu	37.000
50	Budi Luhur	PW	3	Kalisoro, Tawangmangu	37.000
51	Sahabat	PW	3	Kalisoro, Tawangmangu	37.000
52	Nino	PW	5	Banjarsari, Tawangmangu	37.000
53	Coko Joyo	PW	2	Kalisoro, Tawangmangu	37.000
54	Bonita	PW	4	Kalisoro, Tawangmangu	37.000
55	Kirana	PW	4	Kalisoro, Tawangmangu	37.000
56	Arini	PW	3	Kalisoro, Tawangmangu	37.000
57	Wahyu Mulyo	PW	5	Kalisoro, Tawangmangu	37.000
58	Sri Wahyu	PW	4	Gondosuli, Tawangmangu	37.000
59	Madu Laras	PW	5	Kalisoro, Tawangmangu	37.000
60	Arifin	PW	4	Banjarsari, Tawangmangu	37.000
61	Candra	PW	4	Banjarsari, Tawangmangu	37.000
62	Wibowo	PW	4	Banjarsari, Tawangmangu	37.000
63	Sapto Argo	PW	4	Banjarsari, Tawangmangu	37.000
64	Nugroho	PW	3	Beji, Tawangmangu	37.000

65	Melati	PW	5	Nglebak, Tawangmangu	37.000
66	Agas	PW	4	Banjarsari, Tawangmangu	37.000
67	Wisma Kartini	PW	11	Beji, Tawangmangu	37.000
68	Wisma Pertanian	PW	4	Beji, Tawangmangu	37.000
D	COTTAGE				
1	Sukuh Cottage	Cottage	5	Berjo Ngargoyoso	243.000
2	Rindu Alam	Cottage	4	Girimulyo, Ngargoyoso	220.000

Sumber : Statistik Pariwisata Kabupaten Karanganyar Tahun 2008.



Daftar Restoran di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008

No	Nama Restoran / Rumah Makan	Jumlah Kursi	Alamat	Tarif Rata-Rata Per Orang
1	RM Prasajo	20	Karanganyar	5.000
2	RM Dayak	20	Karanganyar	5.000
3	RM Sidomarem	25	Karanganyar	5.000
4	RM Sate Pak Pur	30	Karanganyar	5.000
5	RM Sate Istanto	30	Karanganyar	5.000
6	RM Cakar Lawu	20	Karanganyar	5.000
7	RM Ayam Mikun	20	Karanganyar	5.000
8	RM Soto Giyo	30	Karanganyar	5.000
9	Sate Kambing Luminto	20	Karanganyar	5.000
10	RM Waris Roso	30	Karanganyar	5.000
11	RM Modern	30	Karanganyar	5.000
12	RM Pecel Modern	20	Karanganyar	5.000
13	RM Bu Perkis	20	Karanganyar	5.000
14	RM Tirta Rasa	20	Karanganyar	5.000
15	RM Ayam Panggang "KALANG"	25	Karanganyar	5.000
16	Soto Ayam Sumber Rejeki	16	Karanganyar	5.000
17	Sate "Bu Tamnal"	20	Karanganyar	5.000
18	Sate Kambing Satino	20	Karanganyar	5.000
19	Sate Kambing Muda	20	Karanganyar	5.000
20	RM Sukarasa	30	Karanganyar	5.000
21	RM Bu Medi	30	Karanganyar	5.000
22	Soto Lima Satu	20	Karanganyar	5.000
23	RM Waru Doyang	30	Karanganyar	5.000
24	Bakso Gandem Marem	20	Karanganyar	5.000
25	RM Timlo	26	Karanganyar	5.000
26	RM Selera	30	Karanganyar	5.000
27	RM Mak Tik	30	Karanganyar	5.000
28	WM Griyo Kulo	20	Karanganyar	6.000
29	Warung Lesehan Mbak Dwi	30	Karanganyar	10.000
30	Pemancingan & RM Lesehan Ganten Permai	30	Karanganyar	11.500
31	Ayam Goreng Tulang Lunak "HAWILA"	30	Karanganyar	10.000
32	WM Haji Kisno	20	Karanganyar	11.500
33	RM Roso Jodo	30	Karanganyar	11.500
34	RM M3	30	Karanganyar	17.500
35	WM Kadapiro	30	Karanganyar	17.500
36	WM Sari Asih	20	Karanganyar	10.000
37	RM Warungku	30	Karanganyar	6.000
38	RM Cokro	15	Jaten	6.000
39	RM Murni	20	Jaten	6.000
40	RM Rukun Santoso	20	Jaten	6.000
41	RM Lumayan	26	Jaten	6.000
42	RM Sate Pak Mul	24	Jaten	10.000

43	RM Ibu Raji	20	Jaten	6.000
44	RM Bakso Sapi	20	Jaten	7.500
45	RM Central Food	20	Jaten	6.000
46	Sate Kambing Sumber	20	Jaten	10.000
47	RM Sari Roso	30	Jaten	6.000
48	Bakso Tresno / Paidi	26	Jaten	7.500
49	RM Heksa	30	Jaten	6.000
50	Bakso Rusuk / Sulardi	30	Jaten	7.500
51	RM Rosalia	30	Jaten	6.000
52	Bakso Rusuk	20	Jaten	7.500
53	RM Sederhana	30	Karangpandan	17.000
54	RM Indah	24	Karangpandan	17.000
55	RM Telaga Pandan	30	Karangpandan	17.000
56	RM & Pemancingan Nita	30	Karangpandan	17.000
57	Sate Kambing / Djarot	26	Karangpandan	17.000
58	RM Jimbaran	30	Karangpandan	17.500
59	RM Puncak	20	Karangpandan	17.500
60	RM Pondok Indah	30	Karangpandan	17.500
61	WM Sun Garden	30	Karangpandan	17.500
62	RM Lesehan Mbak Ning	30	Karangpandan	11.500
63	WM Sri Wedari	30	Karangpandan	17.500
64	RM Padang	30	Tasikmadu	10.000
65	Sate Kambing	28	Tasikmadu	10.000
66	RM Madiun	20	Tasikmadu	10.000
67	RM Masaleja	30	Tasikmadu	10.000
68	RM Lesehan Indah	20	Tawangmangu	11.500
69	RM Pak Amat	24	Tawangmangu	11.500
70	RM Sapto Argo	30	Tawangmangu	11.500
71	RM Bangun Trisno	30	Tawangmangu	11.500
72	RM Puas Siti Sari	30	Tawangmangu	11.500
73	Wr. Nasi Pecel Bu "Ugi"	20	Tawangmangu	11.500
74	WM Sederhana	30	Tawangmangu	11.500
75	RM Grojogan Sewu	34	Tawangmangu	11.500
76	WM Bu Sri	30	Tawangmangu	11.500
77	Soto / Mie / Bu Perkis	30	Tawangmangu	11.500
78	RM Soto Darmi	30	Colomadu	6.000
79	RM Soto Ngasem	20	Colomadu	6.000
80	Warung Soto	20	Colomadu	6.000
81	RM Taman Sari	30	Colomadu	6.000
82	WM Soto Klodran	30	Colomadu	6.000
83	RM Mbak Tin	20	Colomadu	6.000
84	RM Lesehan & Pemancingan Mbak Warti	30	Colomadu	11.500

Sumber : Statistik Pariwisata Kabupaten Karanganyar Tahun 2008.

**Tabel Hasil Analisis Potensi Pajak Hotel Di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008**

No	Nama Hotel	Klasifikasi	Potensi Pajak (Rp)
A	HOTEL BINTANG		
1	Lor In	B.5	1.170.460.800
2	Pondok Sari II	B.2	52.992.000
3	Komoyo Komoratih	B.1	53.256.960
4	Narita	B.1	41.274.144
B	HOTEL MELATI		
1	Pondok Sari I	M.3	24.628.032
2	Lawu	M.3	11.764.224
3	Garuda	M.2	18.944.640
4	Hotel Maliyawan	M.2	16.275.168
5	Fajar Indah	M.2	7.750.080
6	Duta	M.2	8.525.088
7	Asri	M.2	22.733.568
8	Pondok Indah	M.2	25.012.224
9	Wahyu Sari A	M.2	7.948.800
10	Wahyu Sari B	M.2	7.948.800
11	Hotel Pringgodani	M.2	9.459.072
12	Marini I	M.2	7.948.800
13	4848	M.2	14.307.840
14	Pondok Asia	M.2	4.915.008
15	Hotel Sido Langgeng	M.2	7.147.296
16	Hotel Tejomoyo	M.2	6.319.296
17	Balai Istirahat Pekerja	M.2	4.769.280
18	Muncul Sari	M.2	6.359.040
19	Bukit Surya	M.2	3.576.960
20	Jonggrang I	M.2	4.769.280
21	Asri	M.2	9.538.560
22	Marini II	M.1	3.576.960
23	Jonggrang II	M.1	5.564.160
24	Anugerah Indah	M.1	1.987.200
25	Bangun Trisno	M.1	3.179.520
26	Kusumo Joglo	M.1	7.153.920
27	Tritunggal	M.1	3.179.520
28	Wisma Yanti	M.1	1.987.200
29	Giri Mulyo	M.1	3.974.400

30	Sari Handayani	M.1	4.371.840
31	Mandaulin	M.1	4.769.280
32	Hotel Sri Dewi	M.1	2.384.640
33	Hotel Sri Rejeki	M.1	2.782.080
34	Hotel Tentrem	M.1	2.782.080
35	Hotel Santosa Mulyo I	M.1	2.782.080
36	Hotel Santosa Mulyo II	M.1	3.974.400
37	Widodo Mulyo	M.1	2.782.080
38	Mekar Indah	M.1	6.359.040
39	Hotel Lumayan	M.1	3.576.960
40	Hotel Rahayu	M.1	2.782.080
41	Hotel Adem Ayem	M.1	1.987.200
42	Hotel Madu Laras	M.1	2.384.640
43	Tirta Sari	M.1	35.769.600
44	Ken Dedes	M.1	8.743.680
45	Sariasih	M.1	4.371.840
46	Puncak	M.1	3.179.520
47	Pringgosari	M.1	5.564.160
48	Srikandi	M.1	7.153.920
C	PONDOK WISATA		
1	Kampungku	PW	735.264
2	Anita	PW	980.352
3	Harjuno	PW	980.352
4	Srimulyo	PW	1.225.440
5	Ary	PW	735.264
6	Dhani	PW	1.225.440
7	Sumber Rejeki	PW	735.264
8	Prasojo	PW	1.225.440
9	Wulan sari	PW	1.225.440
10	Barokah	PW	735.264
11	Adem Ayem	PW	735.264
12	Cempoko Mulyo	PW	1.225.440
13	Wijaya Kusuma I	PW	980.352
14	Wijaya Kusuma II	PW	735.264
15	Artho Moro	PW	1.225.440
16	Sido Mulyo	PW	1.225.440
17	Argo Joyo	PW	1.225.440
18	Sederhana	PW	1.225.440
19	Citra Mandiri	PW	980.352

20	Anil Lestari	PW	1225440
21	Dwi Lestari	PW	1.225.440
22	Rahayu	PW	980.352
23	Sederhana	PW	1.225.440
24	Mihara	PW	735.264
25	Wahyuni	PW	980.352
26	Tri Tunggal	PW	1.225.440
27	Ariska	PW	980.352
28	Losmen Lestari	PW	1.225.440
29	Kartika Sari	PW	980.352
30	Wukir Sari	PW	735.264
31	Anda	PW	735.264
32	Piji Kembar	PW	1.225.440
33	Lumayan	PW	1.225.440
34	Villatini	PW	735.264
35	Tentrem	PW	1.225.440
36	Sartika	PW	735.264
37	Widyamulya	PW	735.264
38	Amarta	PW	1.225.440
39	Sukuh Permai	PW	980.352
40	Widodo Mulyo	PW	980.352
41	Sumber Wening	PW	735.264
42	Oshin	PW	735.264
43	Rama Shinta	PW	735.264
44	Desi	PW	1.225.440
45	Tirta Amarta	PW	735.264
46	Devi	PW	980.352
47	Untung	PW	980.352
48	Sandria	PW	1.225.440
49	Tanjung	PW	980.352
50	Budi Luhur	PW	735.264
51	Sahabat	PW	735.264
52	Nino	PW	1.225.440
53	Coko Joyo	PW	490.176
54	Bonita	PW	980.352
55	Kirana	PW	980.352
56	Arini	PW	735.264
57	Wahyu Mulyo	PW	1.225.440
58	Sri Wahyu	PW	980.352

59	Madu Laras	PW	1.225.440
60	Arifin	PW	980.352
61	Candra	PW	980.352
62	Wibowo	PW	980.352
63	Sapto Argo	PW	980.352
64	Nugroho	PW	735.264
65	Melati	PW	1.225.440
66	Agas	PW	980.352
67	Wisma Kartini	PW	2.695.968
68	Wisma Pertanian	PW	980.352
D	COTTAGE		
1	Sukuh Cottage	Cottage	8.048.160
2	Rindu Alam	Cottage	5.829.120
	JUMLAH		1.770.475.968

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar, data diolah.

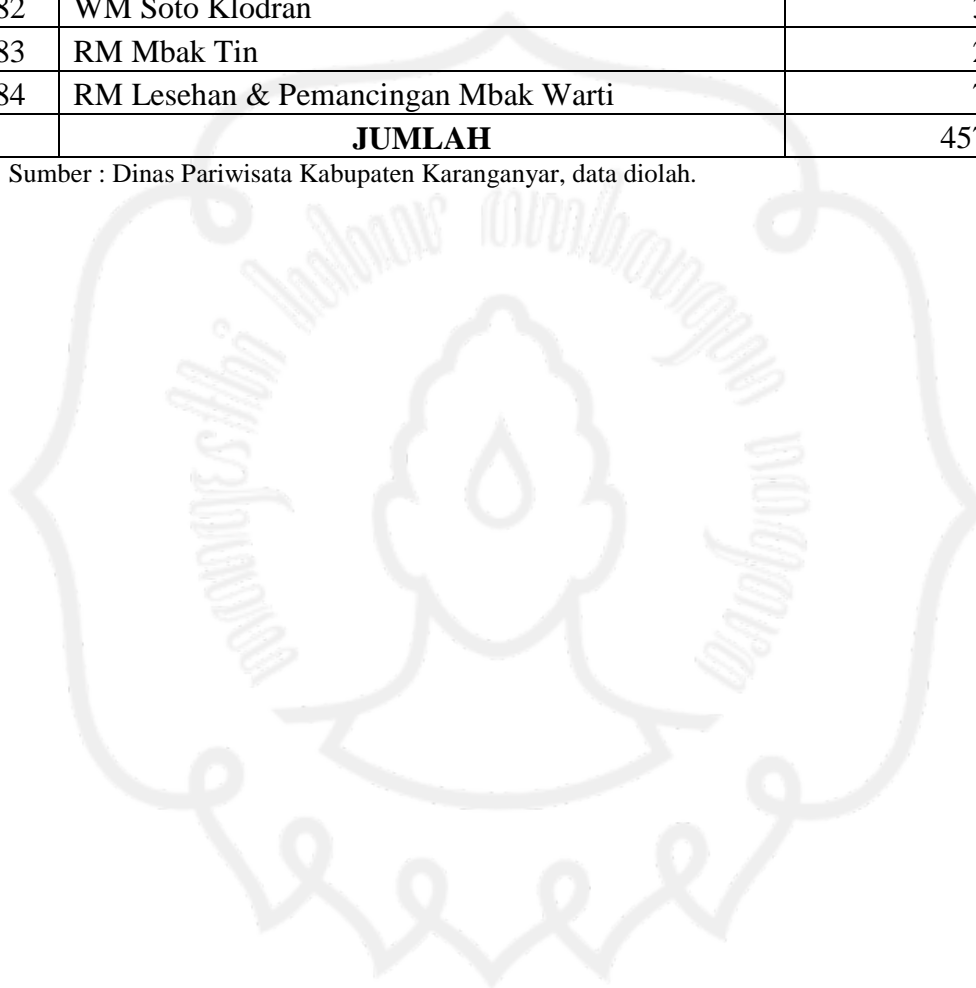
**Tabel Hasil Analisis Potensi Pajak Restoran Di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008**

No	Nama Restoran / Rumah Makan	Potensi Pajak
1	RM Prasajo	3.240.000
2	RM Dayak	3.240.000
3	RM Sidomarem	4.050.000
4	RM Sate Pak Pur	4.860.000
5	RM Sate Istanto	4.860.000
6	RM Cakar Lawu	3.240.000
7	RM Ayam Mikun	4.320.000
8	RM Soto Giyo	3.888.000
9	Sate Kambing Luminto	4.320.000
10	RM Waris Roso	3.888.000
11	RM Modern	6.480.000
12	RM Pecel Modern	2.592.000
13	RM Bu Perkis	2.592.000
14	RM Tirta Rasa	2.592.000
15	RM Ayam Panggang "KALANG"	5.400.000
16	Soto Ayam Sumber Rejeki	2.073.600
17	Sate "Bu Tamnal"	4.320.000
18	Sate Kambing Satino	4.320.000
19	Sate Kambing Muda	4.320.000
20	RM Sukarasa	3.888.000
21	RM Bu Medi	3.888.000
22	Soto Lima Satu	2.592.000
23	RM Waru Doyang	3.888.000
24	Bakso Gandem Marem	3.240.000
25	RM Timlo	4.212.000
26	RM Selera	6.480.000
27	RM Mak Tik	3.888.000
28	WM Griyo Kulo	3.240.000
29	Warung Lesehan Mbak Dwi	6.480.000
30	Pemancingan & RM Lesehan Ganten Permai	7.452.000
31	Ayam Goreng Tulang Lunak "HAWILA"	648.0000
32	WM Haji Kisno	4.968.000
33	RM Roso Jodo	7.452.000
34	RM M3	11.340.000
35	WM Kadipiro	11.340.000

36	WM Sari Asih	4.320.000
37	RM Warungku	3.888.000
38	RM Cokro	1.944.000
39	RM Murni	2.592.000
40	RM Rukun Santoso	2.592.000
41	RM Lumayan	3.369.600
42	RM Sate Pak Mul	5.184.000
43	RM Ibu Raji	2.592.000
44	RM Bakso Sapi	3.240.000
45	RM Central Food	2.592.000
46	Sate Kambing Sumber	4.320.000
47	RM Sari Roso	3.888.000
48	Bakso Tresno / Paidi	4.212.000
49	RM Heksa	3.888.000
50	Bakso Rusuk / Sulardi	4.860.000
51	RM Rosalia	3.888.000
52	Bakso Rusuk	3.240.000
53	RM Sederhana	11.016.000
54	RM Indah	8.812.800
55	RM Telaga Pandan	11.016.000
56	RM & Pemancingan Nita	11.016.000
57	Sate Kambing / Djarot	9.547.200
58	RM Jimbaran	11.340.000
59	RM Puncak	7.560.000
60	RM Pondok Indah	11.340.000
61	WM Sun Garden	11.340.000
62	RM Lesehan Mbak Ning	7.452.000
63	WM Sri Wedari	11.340.000
64	RM Padang	6.480.000
65	Sate Kambing	6.048.000
66	RM Madiun	4.320.000
67	RM Masaleja	6.480.000
68	RM Lesehan Indah	4.968.000
69	RM Pak Amat	5.961.600
70	RM Sapto Argo	7.452.000
71	RM Bangun Trisno	7.452.000
72	RM Puas Siti Sari	7.452.000
73	Wr. Nasi Pecel Bu "Ugi"	4.968.000
74	WM Sederhana	7.452.000

75	RM Grojogan Sewu	8.445.600
76	WM Bu Sri	7.452.000
77	Soto / Mie / Bu Perkis	7.452.000
78	RM Soto Darmi	3.888.000
79	RM Soto Ngasem	2.592.000
80	Warung Soto	2.592.000
81	RM Taman Sari	3.888.000
82	WM Soto Klodran	3.888.000
83	RM Mbak Tin	2.592.000
84	RM Lesehan & Pemancingan Mbak Warti	7.452.000
	JUMLAH	457.088.400

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar, data diolah.



DADANG SAPUTRA matur nuwun kagem :

Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya

Nabi Muhammad SAW sebagai "uswatun hasanah" kita semua

Ayah dan Ibu, Mbak Eva dan Mas Budi atas segala doa dan dukungannya

Para 'Alim 'Ulama, Para Habaiib dan Para Kyai yang selalu mendoakan kita semua

Teman jalan-jalan, nonton, ngeband dan nongkrong :

Dita, Hendi, Bram, Rahmad, Bayu, Danang TW, Puguh, Angga

Teman RISMALAH :

*Ogun, Irvan, Arif, Pram, Denis, Surya, Yudha, Widi, Ario, Wawan, Adit, Lana, Eka, Lala,
Rona, Elis, Ayu dan teman - teman lainnya*

Para Pelanggan Pulsa dan EP Holics :

*Dita, Hendi, Bram, Rahmad, Bayu, Putri, Ita, Oni, Jay, Eka, Lokita, Adri, Nurul, Dany,
Nisa, Angga, Septi, Yusuf, Irawan, Danang TW, Fauzi, Danang Saha, Tia, Anggita, Yono,
Puji, Lilik, Awang, Vita, Arini, Rina, Eros, Ghony, Flora, Vaula, Dina, Elia, Risma, Zuli,
Hilmy, Afit, Denis, Dhito, Deny, Agus, Davit, Onggo, Yoga, Yunita, Apri, Wafi, Fitri,
Maya, Hajar, Hayu, Puguh, Monchu, Raka, Rara, Hesti, Santi, Tika, Yesi, Berna, Devi,
Mario, Satrio, Tino, Toto, Indra, Jonar, Kholid, Nugroho, Fajar, Lativa, Monica, Bimo, Jalu,
dan semua teman-teman EP yang lain yang belum disebutkan
(terima kasih atas segala doa, dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan selama ini dan
semoga kita semua dapat meraih cita-cita yang kita inginkan)*

AMIN